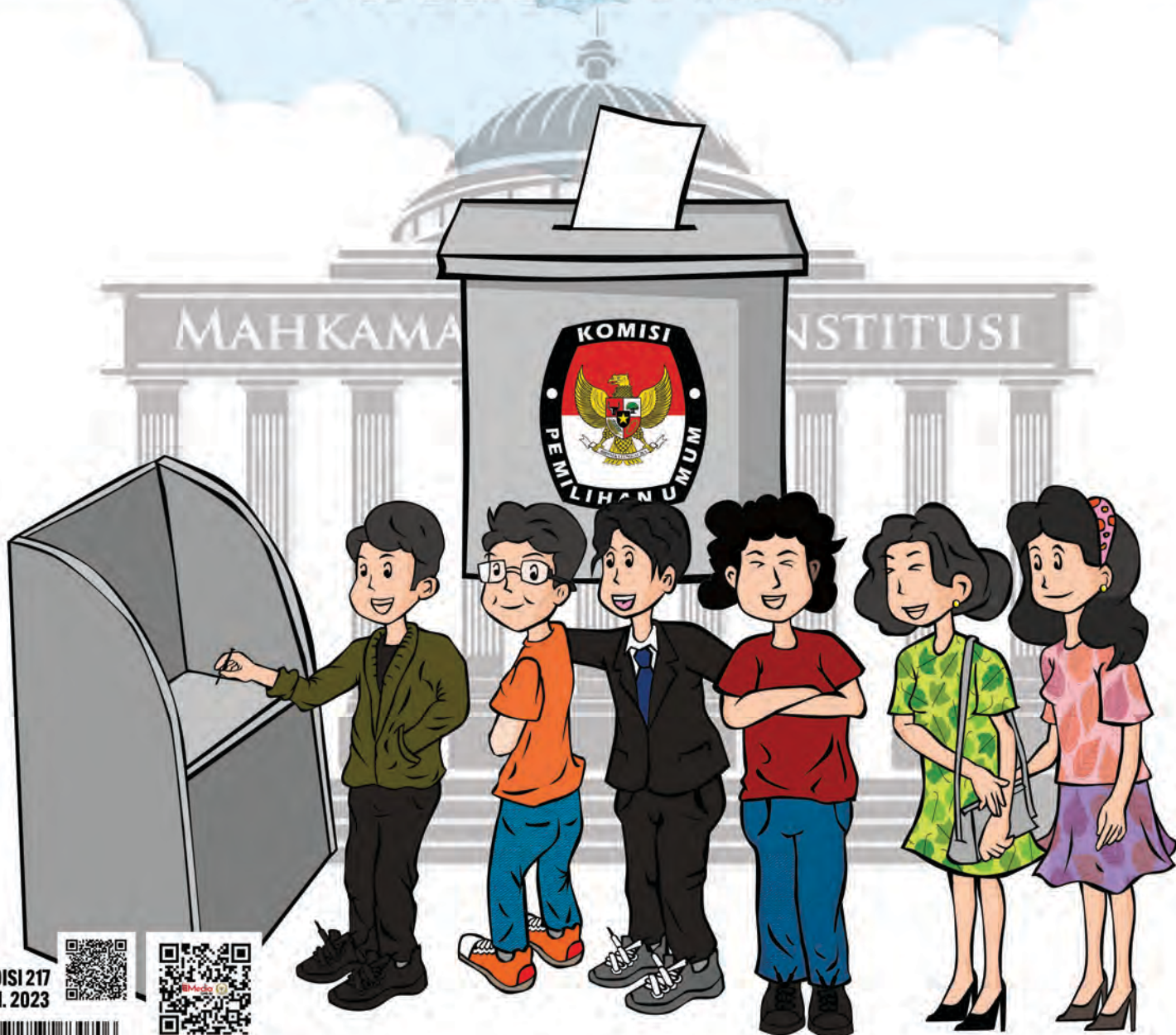




MAJALAH

Parlementaria

Pemilu 2024: Komitmen Jalankan Putusan MK



EDISI 217
TH. 2023



7 25272 73070 6



Parlementaria

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danurto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh
Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane
Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne
Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli,
Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum
Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha,
Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afrdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari,
Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti
Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nu-
graha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad
Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifq Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

LAPORAN UTAMA

Pemilu 2024: Komitmen Jalankan Putusan MK



4

4

PROLOG
PEMILU 2024: KOMITMEN JALANKAN PUTUSAN MK

8

LAPORAN UTAMA
● Komisi II DPR dan KPU Komitmen Dengan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
● MK Diharap Libatkan Parpol Dalam Judicial Review
● Kehendak Rakyat Dalam Konstitusi
● MK Tidak Boleh Punya Standar Ganda

16

SUMBANG SARAN
Mengkaji Penggunaan Sistem Pemilu di Indonesia

18

PENGAWASAN
DPR RI Kaji Perppu Ciptaker

20

ANGGARAN
Perlu Perhitungan Kualitatif Atas Realisasi Anggaran KPC-PEN 2022

22

LEGISLASI
Omnibus Law Kesehatan Harus Cermat dan Hati-hati

24

FOTO BERITA

28

FOTO STORY
Gempita Imlek 2023 Selepas Pandemi

30

PROFIL
Kurniasih Mufidayati
Pengabdian Seorang Wakil Rakyat



PENGAWASAN

DPR RI Kaji Perppu Ciptaker

18



ANGGARAN

Perlu Perhitungan Kualitatif Atas Realisasi Anggaran KPC-PEN 2022

20



LEGISLASI

Omnibus Law Kesehatan Harus Cermat dan Hati-hati

22



- 34 KUNKER**
- 56 SOROTAN**
Audit Total PT GNI
- 58 LIPUTAN KHUSUS**
 - Dua Usulan Resolusi di APPF Bangkok
 - Indonesia-Vietnam Perkuat Bilateral Parlemen
- 60 DAPIL**
- 70 TOKOH**
SYANDRIA KAMERON
Yang Muda Yang Mengangkat Budaya Bangsa
- 72 PERNIK**
Setjen DPR RI Lepas 185 Mahasiswa Program 'Magang Di Rumah Rakyat'
- 74 KIAT SEHAT**
Mengakhiri Pandemi Covid-19
- 76 WISATA**
Sehari di Kota Wong Kito Galo
- 78 HOBI**
BAMBANG HERMANTO
Ngetrail Keliling Indonesia
- 79 POJOK PARLE**
Gado-gado Pelumas Diplomasi

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR_RI



@DPR_RI



DPR RI

w w w . d p r . g o . i d

Pemilu 2024: Komitmen Jalankan Putusan MK

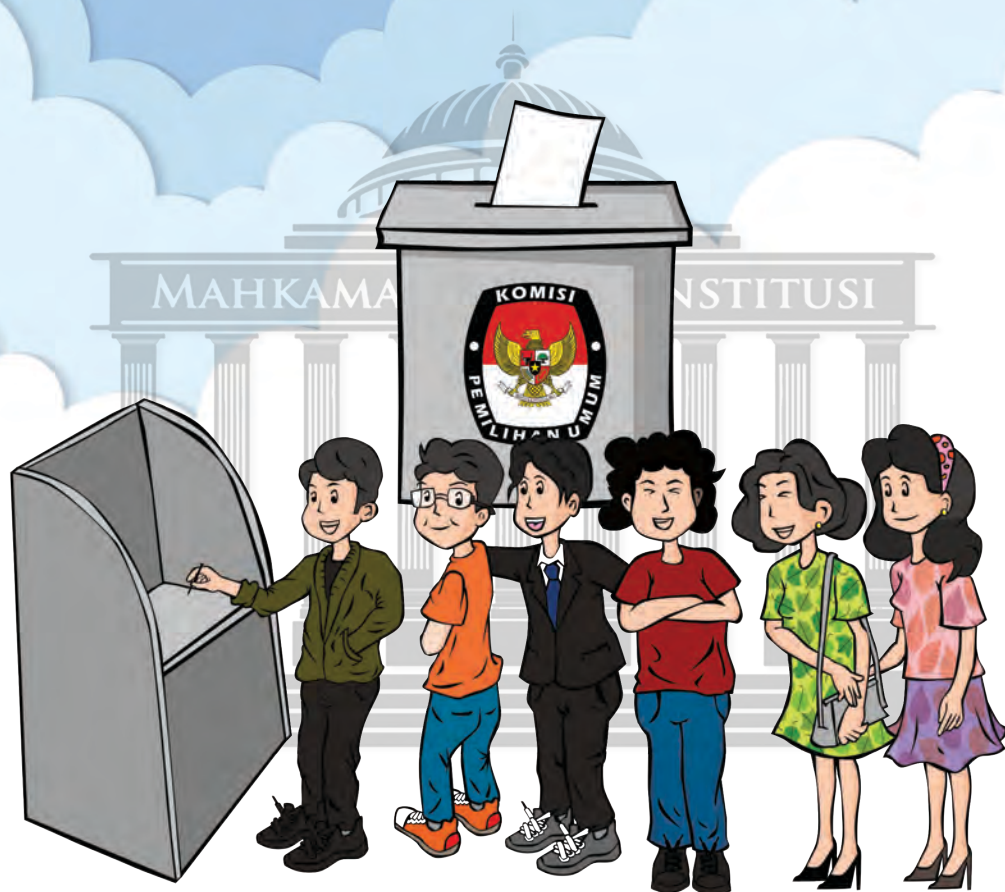
Nafas demokrasi prosedural di Indonesia kembali diuji. Setelah lebih dari sepuluh tahun, Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia meninggalkan Sistem Proporsional Tertutup, kini sistem tersebut diupayakan untuk berlaku kembali melalui pengujian di meja peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah masyarakat. Para Hakim MK diminta untuk menguji materi yang ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan pemilu dilakukan melalui Sistem Proporsional Terbuka.



Kelompok masyarakat yang mengajukan uji materi ke MK tersebut adalah Demas Brian Wicaksono (pengurus PDI Perjuangan

(PDI Perjuangan), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marjiono. Para Pemohon ini mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945.

Dikutip dari laman MK, para pemohon mendalilkan berlakunya norma-norma pasal tersebut yang berkenaan dengan sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak (terbuka), telah bermakna dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal populer dan menjual diri tanpa ada ikatan ideologis dan struktur partai politik, dan tidak memiliki pengalaman dalam





Apapun keputusan MK nantinya menjadi menarik untuk disimak. Sebab putusan MK tersebut akan berimplikasi banyak hal yang bersifat struktural, di antaranya adalah revisi UU Pemilu beserta aturan turunan di bawahnya seperti Peraturan KPU dan Bawaslu, hingga implikasi terhadap hitung ulang anggaran pemilu oleh pemerintah.

mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik.

Akibatnya, saat terpilih menjadi anggota DPR/DPRD seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik, namun mewakili diri sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ada otoritas kepartaian yang menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil partai di parlemen setelah mengikuti pendidikan politik, kaderisasi, dan pembinaan ideologi partai.

Selain itu, menurut pemohon bahwa pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan individualisme para politisi, yang berakibat pada konflik internal dan kanibalisme di internal partai politik yang bersangkutan. Sebab, proporsional terbuka ini dinilai melahirkan liberalisme politik atau persaingan bebas dengan menempatkan kemenangan individual total dalam pemilu. Mestinya kompetisi terjadi antarpolisi politik di area pemilu. Sebab, peserta pemilu adalah partai politik bukan individu seperti yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945.

Meskipun demikian, bagi partai yang pro terhadap Sistem Proporsional Terbuka memiliki dalil konstitusional yang didasarkan pada UUD 1945 amandemen keempat Pasal 1 Ayat (2), yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Argumentasi tersebut dipahami sebagai kerangka umum (*frame work*) bahwa rakyat dapat menentukan langsung para wakilnya di legislatif, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota secara terbuka.

Sistem ini dinilai lebih mengedepankan asas keterbukaan dan profesionalisme bagi para calon legislatif. Mereka terpilih bukan karena kedekatan personal dengan pengambil keputusan di internal partai, melainkan murni karena kehendak mayoritas masyarakat yang memilihnya. Sistem ini memungkinkan juga agar rakyat mengetahui kepada siapa aspirasi akan dititipkan kelak ketika sudah terpilih menjadi legislator. Kedekatan antara caleg dengan rakyat yang akan memilihnya inilah yang dinilai menjadi poin keunggulan Sistem Proporsional Terbuka ketimbang Sistem Proporsional Tertutup.

Meskipun demikian, di balik perdebatan akademik mengenai sistem pemilu apa yang ideal untuk dijalankan di Pemilu 2024, MK memiliki kewenangan konstitusional yang bersifat final dan mengikat (*binding*). salah satunya untuk



Apapun putusan MK nantinya, semua pihak terkait, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) final untuk mengikuti keputusan tersebut.

menguji UU atas UUD. Setiap pasal yang diuji oleh pemohon pun akan mengundang pihak-pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan secara utuh. Termasuk, penjelasan *raison d'être* dari DPR selaku pembuat UU untuk menetapkan menggunakan Sistem Proporsional Terbuka di setiap pemilu.

Selain DPR, MK juga akan mengundang pihak-pihak terkait yang memiliki *legal standing* langsung dalam Pemilu 2024, yaitu para fungsionaris partai yang telah ditetapkan KPU akan menjadi peserta dalam pemilu, baik partai yang telah memiliki wakilnya di legislatif (partai parlemen) maupun partai yang belum memiliki wakilnya di legislatif (partai non parlemen).

Apapun keputusan MK nantinya menjadi menarik untuk disimak. Sebab putusan MK tersebut akan berimplikasi banyak hal yang bersifat struktural, di antaranya adalah revisi UU Pemilu beserta aturan turunan di bawahnya seperti Peraturan KPU dan Bawaslu, hingga implikasi terhadap hitung ulang anggaran pemilu oleh pemerintah. Putusan MK ini juga akan menentukan apakah jika terjadi perubahan sistem pemilu tersebut, dapat dilakukan pada Pemilu 2024 atau akan dilakukan penyesuaian secara bertahap di pemilu-pemilu berikutnya.

Apapun putusan MK nantinya, semua pihak terkait, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) final untuk mengikuti keputusan tersebut. Tidak hanya mengikuti, namun para pihak terkait juga harus mengawal keputusan MK sebagai lembaga yudikatif pemilih keputusan tertinggi dalam suatu negara. Sehingga, keputusan yang diambil dapat mengakomodasi dua hal: antara kepentingan rakyat untuk memberikan suara, dan kepentingan konstitusi untuk menjalankan demokrasi tetap dalam koridor hukum. — tim/mh

Tahapan Pemilu 2024



9

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



PEMUNGUTAN SUARA

14 FEBRUARI 2024

PERHITUNGAN SUARA

14 - 15 FEBRUARI 2024

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

**15 FEBRUARI 2024
sampai dengan
20 MARET 2024**

10

PENETAPAN HASIL PEMILU

Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

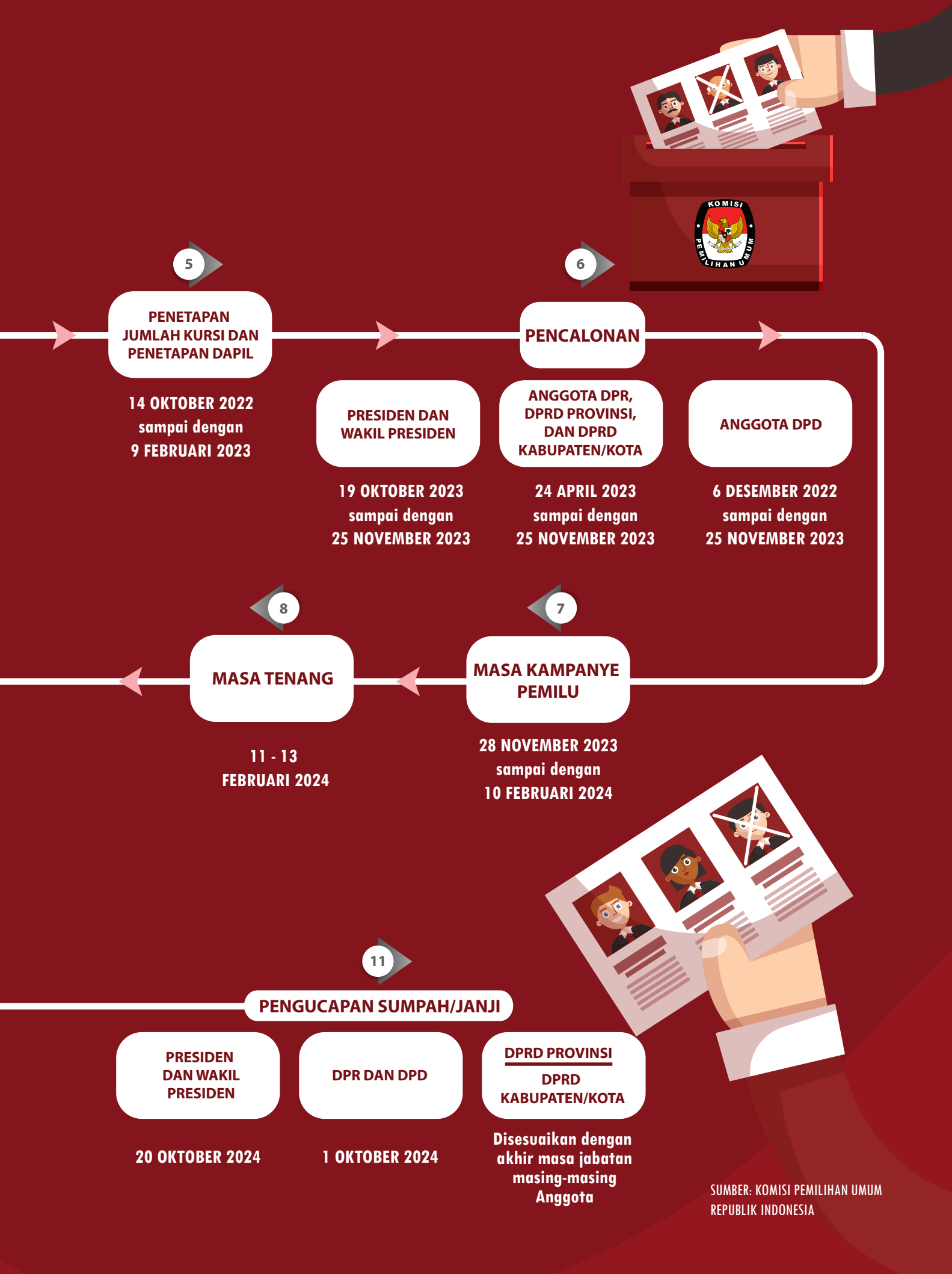
Penetapan calon terpilih anggota DPD

TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

paling lambat 3 hari
pasca putusan
Mahkamah Konstitusi

TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

paling lambat 3 hari
setelah KPU memperoleh
surat pemberitahuan dari
Mahkamah Konstitusi



5

**PENETAPAN
JUMLAH KURSI DAN
PENETAPAN DAPIL**

**14 OKTOBER 2022
sampai dengan
9 FEBRUARI 2023**

6

PENCALONAN

**PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN**

**19 OKTOBER 2023
sampai dengan
25 NOVEMBER 2023**

**ANGGOTA DPR,
DPRD PROVINSI,
DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

**24 APRIL 2023
sampai dengan
25 NOVEMBER 2023**

ANGGOTA DPD

**6 DESEMBER 2022
sampai dengan
25 NOVEMBER 2023**

8

MASA TENANG

**11 - 13
FEBRUARI 2024**

7

**MASA KAMPANYE
PEMILU**

**28 NOVEMBER 2023
sampai dengan
10 FEBRUARI 2024**

11

PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

**PRESIDEN
DAN WAKIL
PRESIDEN**

20 OKTOBER 2024

DPR DAN DPD

1 OKTOBER 2024

**DPRD PROVINSI
DPRD
KABUPATEN/KOTA**

**Disesuaikan dengan
akhir masa jabatan
masing-masing
Anggota**

Komisi II DPR dan KPU Komitmen Dengan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka



Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, ada kemungkinan sistem Pemilu 2024 akan

kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Hal tersebut dia sampaikan pada acara Catatan Akhir Tahun KPU di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, akhir Desember 2022 lalu. Hasyim saat itu mengatakan sistem tersebut sedang dibahas melalui sidang MK.

Sontak, wacana menggunakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu legislatif 2024 menuai pro dan kontra di tengah masyarakat tak terkecuali antarfraksi/party politik di parlemen yang kemudian terbelah dalam menyikapi munculnya isu tersebut. Di DPR RI, PDIP menjadi partai pendukung utama dan hanya satu-satunya parpol yang mengusulkan sistem proporsional tertutup. Sementara itu, 8 fraksi lain, yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, PAN, Demokrat, dan PKS tetap ingin mempertahankan sistem proporsional terbuka.

Sebagaimana diketahui, dalam sistem proporsional terbuka, keterpilihan calon legislator ditentukan oleh dukungan rakyat dengan metode suara terbanyak. Sementara itu, merujuk istilah politik, sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilu di mana keterpilihan wakil rakyat didasarkan

Pro dan kontra sistem Pemilu 2024 antara proporsional terbuka vs tertutup menjadi perbincangan hangat jelang Pemilu 2024 mendatang. Publik dikejutkan dengan suasana politik dalam negeri yang kurang “adem ayem” dari akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023. Hal ini dipicu bergulirnya wacana sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik seiring gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR RI dengan beberapa mitra kerja.

pada nomor urut yang ditentukan oleh partai politik. Pemilih hanya memilih partai politik dan penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut.

Redam Situasi

Menyikapi hal itu, Komisi II DPR RI langsung menggelar rapat dengan KPU, Menteri Dalam Negeri, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP

(Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), awal Januari lalu, untuk meredam situasi. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung ingin memastikan semua tahapan Pemilu berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan apapun, baik eksternal maupun internal. Termasuk, dari internal institusi penyelenggara Pemilu sendiri.

“Karena sangat tingginya atensi tersebut, maka banyak rumor yang



FOTO: ARIEF/NR

Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa.

harus kita jawab. Itulah kenapa, teman-teman di DPR, khususnya di Komisi II bereaksi mengambil sikap setiap kali ada pernyataan-pernyataan yang tidak pada tempatnya. Konteksnya bukan karena hal-hal lain, namun kita ingin proposional, kita ingin suasana kondusif, dan tidak menjadi polemik di publik. Kita juga perlu mengetahui per hari ini persiapan yang kita lakukan untuk Pemilu di tahun 2024 dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Perdebatan Alot

Perdebatan alot sempat terjadi, hingga puncaknya saat masuk pada sesi terakhir yaitu, pembacaan kesimpulan rapat kerja. Ketua KPU Hasyim Asyari sempat mengusulkan agar narasi kesimpulan rapat tak perlu menyinggung sistem proporsional terbuka secara eksplisit, melainkan cukup dinyatakan "berkomitmen menjalankan Pemilu 2024 sesuai UU Pemilu" yang di dalamnya memang termaktub sistem

proporsional terbuka.

Namun, Hasyim balik dicecar atas pernyataannya itu. Hasyim dinilai perlu menjadi sosok yang paling bertanggung jawab karena munculnya polemik sistem Pemilu ini usai pemberitaan terhadap pidatonya di Catatan Akhir Tahun KPU, Desember 2022, yang saat itu Hasyim mengomentari judicial review di MK terhadap pasal sistem proporsional terbuka UU Pemilu.

Kala itu, Hasyim mengimbau warga yang ingin maju sebagai calon legislator untuk menunda sosialisasi dirinya dalam bentuk baliho, spanduk, dan sejenisnya, karena ada peluang MK memutuskan tak lagi memakai sistem proporsional terbuka. Statemen secara sepihak ini menuai respons negatif dari mayoritas partai politik peserta pemilu. Hanya PDI Perjuangan yang mengaku setuju agar pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup.

Ucapan Hasyim kemudian ditafsirkan sebagai dukungan lembaga penyelenggara pemilu terhadap sistem tertentu, suatu hal yang sudah dibantah Hasyim berulang kali kepada wartawan dan dalam forum-forum resmi, termasuk dalam rapat kerja. Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa dari Fraksi Nasdem mengklaim bahwa akibat pernyataan Hasyim, banyak bakal calon legislator di akar rumput menunda rencana mereka menyosialisasikan diri. Akibatnya, tak sedikit partai politik yang kesulitan menjaring caleg.

Senada, Doli pun sempat menyatakan bahwa sebagai salah satu pimpinan partai politik, tersinggung atas komentar Ketua KPU itu. Seharusnya, menurut Doli, yang berhak tidaknya seorang caleg untuk sosialisasi dirinya dalam bentuk baliho, spanduk, dan sejenisnya adalah pimpinan partai politik, bukan KPU. Doli mengkritik KPU yang berbicara soal peluang pemilihan legislatif akan dilakukan secara proporsional tertutup

pada Pemilu 2024. Doli menilai KPU telah berbicara topik di luar kewenangannya.

Komitmen Sistem Terbuka

Perdebatan alot ini membuat rapat kerja berlangsung hingga 8 jam. Kesepakatan baru tercapai ketika muncul alternatif agar dibuat poin kesimpulan baru, yaitu poin 4 yang pada intinya menyatakan KPU tegas mendukung Pemilu 2024 mengacu pada UU No.7/2017 tentang Pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka.

"KPU RI berkomitmen menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 2 UU Pemilu dan dikuatkan oleh putusan MK RI nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008," ujar Doli, membacakan salah satu dari enam butir kesimpulan.

Tak hanya itu, Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam negeri, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI bersepakat, pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU No.7/2017 tentang Pemilu. Sesuai dengan UU tersebut.

Merespon hal itu, KPU memastikan anggaran Pemilu 2024 masih menggunakan skema pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggaran tersebut sudah meliputi biaya untuk desain surat suara, alat perlengkapan pemungutan suara, dan sebagainya. Hasyim menyebut anggaran Pemilu telah disetujui dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) oleh Presiden Joko Widodo.

Hasyim selanjutnya membeberkan anggaran pemilu sebesar Rp8,061 triliun dan yang disetujui dalam DIPA sebesar Rp3,63 triliun. Selanjutnya untuk 2023, anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp23,85 triliun dan yang disetujui Rp15,98 triliun.

— pun/mh

MK Diharap Libatkan Parpol Dalam Judicial Review

Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan melibatkan partai politik (Parpol) dalam gugatan Judicial Review UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), dalam menentukan sistem pemilu di Tanah Air. Sistem proporsional terbuka masih ingin dipertahankan pada Pemilu 2024.

Saan meminta penyelenggara pemilu termasuk KPU tidak menimbulkan ketidakpastian bagi parpol jelang Pemilu 2024. Saan pun mengecam pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang memunculkan spekulasi soal perubahan sistem pemilu terbuka



Pelibatan Parpol dinilai Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa penting dipertimbangkan oleh MK. Sebab, MK bisa mendengar

pandangan partai dalam mengambil keputusan terhadap penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Melalui pandangan masing-masing partai, tentu MK bisa mempertimbangkan semuanya dalam mengambil keputusan.

"Sebab, DPR dan pemerintah sepakat tidak akan mengubah UU Pemilu. Kita nanti meminta MK mengikutsertakan parta-partai sebagai pihak terkait. Kita berharap MK nanti ketika berproses mendengar semua pihak di parlemen, karena kita ingin sistem proporsional terbuka di Pemilu 2024," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Rabu (4/1/2023) lalu.

Lebih lanjut, Saan menegaskan pihaknya ingin sistem proporsional terbuka dipertahankan. Sebab, hal ini merupakan langkah maju penyelenggaraan demokrasi. Jika kembali ke proporsional tertutup, maka itu sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

Sistem proporsional tertutup dinilai tidak merepresentasikan

“

Sebab, DPR dan pemerintah sepakat tidak akan mengubah UU Pemilu. Kita nanti meminta MK mengikutsertakan parta-partai sebagai pihak terkait. Kita berharap MK nanti ketika berproses mendengar semua pihak di parlemen, karena kita ingin sistem proporsional terbuka di Pemilu 2024,

Saan Mustopa
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

FOTO: GERALDI/ANR



sistem perwakilan. Mengacu pada penentuan anggota legislatif pada sistem proporsional terbuka ditentukan langsung oleh masyarakat pemilih, sedangkan pada proporsional tertutup tergantung partai. Sistem proporsional tertutup membuat masyarakat tidak mendapatkan hak untuk menentukan siapa wakil yang mereka anggap terbaik untuk mewakilinya.

menjadi tertutup. Sebelumnya kecaman senada dilontarkan Saan dalam keterangan resminya, menanggapi Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang membicarakan Pemilu 2024 kemungkinan kembali ke sistem proporsional tertutup. Saan menilai Hasyim sudah melampaui batas kewenangannya terkait pernyataan itu.

"Ketua KPU sudah melampaui batas kewenangannya dan bisa dikatakan melakukan intervensi terhadap perkara yang sedang berproses di MK. Sebab bisa dikatakan mengintervensi soal sistem proporsional tertutup yang kini perkaranya masih dibahas di MK. Dan bisa dikatakan melakukan intervensi terhadap perkara yang sedang berproses di MK," tandas Saan.

Terkait hal itu, Saan kembali menyanggah komentar Ketua KPU soal peluang pemilu sistem proporsional tertutup. Komentar tersebut diduga dapat menimbulkan kegaduhan politik jelang Pemilu 2024. "Pernyataan Ketua KPU ini menjadi salah satu sebab munculnya kegaduhan politik, lalu ada ketidakpastian politik bagi partai-partai," tegas Saan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengimbau Ketua KPU untuk fokus kepada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya saja dan agar sebelum menyampaikan opini atau pernyataan, dipertimbangkan dahulu dampak baik dan buruknya terhadap stabilitas hukum, politik, sosial, keamanan. MK sebelumnya melalui Putusan No.22-24/PUU-VI/2008 telah memberikan keputusan yang menjadi acuan bagi DPR RI bersama pemerintah untuk membuat dan menerapkan sistem pemilu

“

MK telah memutuskan bahwa sistem pemilu yang konstitusional adalah sistem pemilu terbuka dan putusan tersebut sudah final. Sehingga, hal tersebut menjadi acuan bagi DPR RI bersama pemerintah untuk membuat dan menerapkan sistem pemilu terbuka pada pemilu 2009 sampai dengan pemilu 2019 lalu.

Riyanta
Anggota Komisi II DPR RI

FOTO: GERALDI/NR



terbuka pada Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2019.

"Dinamika politik menjelang dilaksanakannya pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 meningkat. Hal ini lumrah dalam sistem negara demokrasi. Namun, sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara

hukum. Maka dinamika politik harus sesuai dengan hukum yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia," ungkap Riyanta dalam keterangan resminya, awal Januari lalu.

Dalam hal ini, MK telah memutuskan bahwa sistem pemilu yang konstitusional adalah sistem pemilu terbuka dan putusan tersebut sudah final. Sehingga, hal tersebut ditegaskan kembali Riyanta menjadi acuan bagi DPR RI bersama pemerintah untuk membuat dan menerapkan sistem pemilu terbuka pada pemilu 2009 sampai dengan pemilu 2019 lalu.

Hukum harus ditegaskan sesuai dengan prinsip dasar negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945), serta konstitusi sebagai "Kepala Negara" dan sebagai "Panglima." Selain itu, persoalan permohonan judicial review tersebut ditegaskan Riyanta harus dipercayakan sepenuhnya kepada MK. "Yakinlah hakim-hakim konstitusi adalah manusia-manusia pilihan yang mempunyai integritas yang mulia," tutup politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut. — pun/mh

“

Ketua KPU sudah melampaui batas kewenangannya dan bisa dikatakan melakukan intervensi terhadap perkara yang sedang berproses di MK. Sebab bisa dikatakan mengintervensi soal sistem proporsional tertutup yang kini perkaranya masih dibahas di MK. Dan bisa dikatakan melakukan intervensi terhadap perkara yang sedang berproses di MK.

Saan Mustopa
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Kehendak Rakyat Dalam Konstitusi

Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Juni 2022 silam. Dimulai dengan Penyusunan Peraturan KPU, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, hingga Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (Dapil) hingga 9 Februari 2023.



Tahapan pemilu untuk menyongsong pesta demokrasi ini akan terus berlanjut hingga puncaknya pada 14 Februari 2024. Masyarakat

menentukan kehendaknya sendiri untuk memilih calon presiden/wakil presiden, serta legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini eksisting, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu 2024 mendatang merupakan penyelenggaraan pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam proses menentukan suara itu, masyarakat dinilai memiliki kebebasan secara sadar untuk memilih wakilnya di parlemen, pusat hingga daerah. UU Pemilu tersebut mengamanatkan diselenggarakannya pemilu serentak melalui mekanisme Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup.

Lalu, apa yang dimaksud dengan Sistem Proporsional Tertutup? Apa bedanya dengan Sistem Proporsional Terbuka? Studi literatur dari Jurnal UMY, Yogyakarta, menyebutkan, pada dasarnya Sistem Proporsional dapat dimaknai bahwa satu dapil memilih beberapa wakil. Sistem ini juga



Kalau kita kembali kepada konstitusi itu, maka lebih tepat dilaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Karena apa? Karena keterbukaan itu menyebabkan pilihan ibet-ibetul berada di tangan rakyat, terhadap siapa yang akan dipilih menjadi pimpinan dari satu dapil menjadi anggota legislatif delegasi parpol itu.

FOTO: ARIEF/NR

Syamsurizal
Wakil Ketua Komisi II DPR RI



Sistem Proporsional Tertutup, yaitu pada Pemilu 1955, Pemilu Orde Baru, dan Pemilu 1999. Selain pada pemilu di era Orde Lama dan Orde Baru itu, Sistem Proporsional Tertutup juga masih digunakan pada Pemilu 2004. Namun, Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Desember 2008 membuat

dinamakan perwakilan berimbang (multi member constituency).

Terdapat dua jenis sistem dalam Sistem Proporsional, yaitu Sistem Proporsional Tertutup. Partai-partai peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai, dan alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada. Sedangkan, Sistem Proporsional Terbuka, yaitu para pemilih diberi otoritas untuk menentukan pilihannya. Pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota yang sudah diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang sejarah pemilu, Indonesia pernah menggunakan

sistem ini tak lagi digunakan pada Pemilu 2009. Dalam putusannya saat itu, MK menilai pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka akan mendorong sistem yang positif.

Dalam sistem ini, penetapan daerah pemilihan dilakukan berdasarkan basis wilayah. Hal ini membuat setiap daerah akan memiliki wakil mereka masing-masing. Di sisi lain, MK juga menilai, apabila pemilihan dilakukan dengan memilih nama kandidat, hubungan antara orang yang memilih dan dipilih menjadi lebih dekat. Sistem ini membuat para pemilih dapat mengenal wakil-wakil mereka dan menilai siapa yang benar-benar memperjuangkan pemilih dan



FOTO: OJI/NR

“

Termasuk, MK juga akan mempertimbangkan apakah keputusan menggunakan sistem pemilu tertentu akan diterapkan pada Pemilu 2024, atau pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Rifqinizamy Karsayuda
Anggota Komisi II DPR RI

daerahnya. Di sisi lain, para kandidat akan menjaga kredibilitas mereka di depan rakyat yang memilihnya.

"Kalau kita kembali kepada konstitusi itu, maka lebih tepat dilaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Karena apa? Karena keterbukaan itu menyebabkan pilihan betul-betul berada di tangan rakyat, terhadap siapa yang akan dipilih menjadi pimpinan dari satu dapil menjadi anggota legislatif delegasi parpol itu," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal.

Kedaulatan Rakyat atau Parpol?

Meskipun demikian, penentuan Sistem Proporsional Tertutup bukan tanpa argumentasi. Sebab, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, partai politik merupakan peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Argumentasi ini menentukan bahwa partai politik memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa calon yang

akan diusung dan/atau diusulkan maju dalam pemilihan legislatif. Bahkan, partai atau gabungan partai juga memiliki kewenangan penuh pula untuk mengusulkan kandidat presiden dan wakil presiden yang akan diusungnya. Sehingga, dalam Sistem Proporsional Tertutup, kedaulatan rakyat hanya sampai pada menentukan parpol mana yang dinilai mampu mewakili aspirasinya.

Selanjutnya, internal di dalam parpol tersebut yang memutuskan siapa calon legislatif yang akan duduk di kursi parlemen pusat maupun daerah, melalui sistem nomor urut. Sistem ini dinilai hanya berdasarkan kedekatan antara caleg yang akan maju dengan pimpinan parpol yang menjadi penentu keputusan. Termasuk, diduga akan semakin memperkuat praktik oligarki di internal parpol karena keputusan bukan didasarkan pada objektivitas dan profesionalisme caleg, namun berdasarkan pada subjektivitas dan kedekatan personal caleg dengan pimpinan partai.

"Ini yang menyebabkan keberatan-keberatan masyarakat. Karena orang yang sudah dipilih selama ini dengan beberapa kali pemilu, mereka bisa masuk dan mendapat pendidikan politik, karena mereka masuk ke partai politik. Tapi, dengan sistem proporsional tertutup

mereka kini tidak lagi bebas masuk ke partai tertentu," tambah politisi Fraksi PPP ini. Jika ini secara kontinu terus berlanjut, menurutnya, masyarakat akan semakin dirugikan.

Sebaliknya, dengan Sistem Proporsional Terbuka, partai justru lebih mudah mendapatkan kader-kader terbaik untuk bekerja di parlemen yang sebelumnya sudah bekerja banyak di masyarakat. "Kalau partai ambil dari orang luar yang dipandang berkualitas oleh masyarakat, maka yang berkualitas yang duduk di DPR itu yang mewakili orang-orang yang dipandang masyarakat berkualitas. Ya, karena masyarakatlah yang tahu bagaimana kondisi orang dari mereka yang ada di keseharian masyarakat," tegas wakil rakyat dapil Riau I ini.

Ketaatan Terhadap Konstitusi

Meskipun demikian, dialektika antara Sistem Proporsional Tertutup maupun Sistem Proporsional Terbuka ini merupakan hal yang dinamis, tergantung pada aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Karena itu, uji materil oleh pihak terkait terhadap penggunaan sistem tersebut pada Pemilu 2024 menjadi sah dan keputusan tertinggi berada di palu para hakim MK.

MK memiliki kewenangan untuk memutuskan sistem mana yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk pula memutuskan untuk mengembalikan kewenangan menentukan sistem pemilu kepada pembuat undang-undang, yaitu DPR (open legal policy). Sebab, sejumlah pengamat menyebutkan, pilihan sistem pemilu untuk DPR dan DPRD tidak diatur jelas dalam konstitusi. Kewenangan MK terbatas sebagai pemberi rambu-rambu saat pembentuk UU ingin mengevaluasi sistem tersebut.

Konstitusi Negara Republik Indonesia dinilai tidak mengatur eksplisit pilihan sistem pemilu yang dianut untuk pemilihan DPR, DPRD, dan DPD. Hal ini berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang jelas diatur sistemnya.

rdn/mh

MK Tidak Boleh Punya Standar Ganda



FOTO: RUNI

Delapan fraksi di DPR RI saat menggelar Konferensi Pers untuk menolak rencana pemilu kembali digelar dengan sistem proporsional tertutup di Gedung Nusantara III.

Perbedaan pandangan mengenai sistem pemilihan umum (Pemilu) untuk 2024 mencuat belakangan ini.

Hal ini dipicu oleh sebuah wacana akan diterapkan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik akibat ada yang menggugatnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Menjadi lebih ramai, lantaran wacana ini dilontarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, yang bahkan meminta para bakal calon legislatif tidak terburu-buru melakukan kampanye.

pertemuan dan sepakat kokoh dengan pemilu terbuka.

Kedelapan fraksi ini kemudian berlanjut menyatakan sikapnya dengan Press Conference di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu, (11/1/2023) lalu. Mereka bersama-sama membacakan pernyataan sikapnya untuk terus mengawal setiap proses gugatan di MK terkait pelaksanaan sistem pemilu. Salah satu poin pernyataan sikap ini meminta MK konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7/2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia.

Hal ini juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II sekaligus Politisi Fraksi PKB Yanuar Prihatin, yang menyatakan delapan fraksi di DPR menyatakan sikap terbuka menolak tertutup (proporsional) dan bertahan



Di parlemen, PDIP menjadi partai pendukung utama dan hanya satu-satunya parpol yang mengusulkan

sistem proporsional tertutup. Sementara delapan fraksi di DPR

lainnya dengan tegas menolak itu. Puncaknya, Minggu, 8 Januari 2023 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Mereka yang menolak, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melakukan

pada proporsional terbuka. "Sudah bisa kelihatan bahwa delapan fraksi tetap bertahan pada proporsional terbuka dan itu pasti akan kita sampaikan kepada KPU dan kepada pemerintah melalui Kemendagri untuk soal yang satu ini. Artinya, dari sudut pandang itu tidak ada masalah bahwa kita tetap komitmen dengan proporsional terbuka." kata Yanuar

Dalam pandangannya, Yanuar menilai sistem pemilu proporsional tertutup akan berpotensi menutup kompetisi antarsesama kader dalam satu partai. Oleh karena itu ia berpandangan bahwa sistem itu, berbeda dengan sistem pemilu proporsional terbuka, berpeluang menghidupkan oligarki dalam tubuh partai politik. "Bagi partai politik yang punya tradisi komando yang kuat dan sedikit otoriter, sistem pemilu proporsional tertutup ini lebih disukai. Tertutupnya kompetisi antara sesama kader. Juga melahirkan para politisi yang lebih mengakar ke atas daripada ke bawah," ujar Yanuar.

Lanjut Yanuar, jika ada pihak yang mengusulkan sistem proporsional tertutup, maka menurutnya, mereka ingin membawa musibah dan kecelakaan dalam demokrasi. Apalagi, jika MK turut melegalisasi sistem tertutup tersebut. Oleh karena itu, ia meminta tidak ada satu pihak pun yang bermain-main dengan sistem kepemiluan yang sudah ada di Indonesia. Ia tak ingin, keghairahan dan partisipasi politik rakyat yang sudah terjadi melalui sistem pemilu proporsional terbuka, hilang karena sistem Pemilu tertutup.

"Kita semua sudah berinvestasi besar untuk menumbuhkan keghairahan dan partisipasi politik rakyat, memperkuat hubungan timbal balik antara rakyat dan wakilnya, serta membangun budaya kompetisi yang masih terukur," jelasnya. Mengutip Wakil Ketua

“

Ratusan nyawa anak Indonesia, calon generasi penerus bangsa melayang, tapi informasi penyebabnya masih gelap dan sangat terbatas

Yanuar Prihatin
Wakil Ketua Komisi II DPR RI



DPR RI sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Yanuar menilai usulan penerapan proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 tidak logis.

Legislator Dapil Jawa Barat X ini juga meminta MK menjaga integritasnya dan tidak menerapkan standar ganda dalam memberikan keputusan. Ia pun mengingatkan, MK pada tahun 2008 sudah memutuskan kasus yang serupa dan MK jugalah yang mendorong dari yang tertutup ke terbuka. Jika MK memutuskan Pemilu menjadi sistem tertutup maka akan menimbulkan tanda tanya besar bagi publik.

"Loh, kok, terhadap kasus yang sama, case yang kurang lebih sama, kenapa bisa ada standar ganda kalau nanti MK putusan tertutup? Lantas ini apa masalahnya, masa konstitusi memberikan standar ganda terhadap kasus yang sama?" ulasnya penuh tanda tanya. Jika ditarik ke belakang, perdebatan penggunaan sistem proporsional terbuka atau tertutup sebenarnya bukan hal yang baru. Hal ini sudah diperdebatkan ketika proses pembahasan UU No.7/2017 tentang Pemilu.

Perdebatan ini diakhiri dengan bulatnya sikap semua fraksi untuk menetapkan sistem proporsional terbuka sebagai sistem yang akan digunakan dalam Pemilu. Hal ini tertuang dalam Pasal 168 ayat (2) yang berbunyi "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka". Di sisi lain, Yanuar mengingatkan KPU bisa menjaga independensinya sebagai salah satu badan penyelenggara pemilu 2024 yang sudah mendapatkan mandat dari konstitusi.

Untuk itu, Yanuar meminta agar KPU bisa waspada dan menjaga integritasnya sebagai lembaga independen. Ia juga berpesan agar KPU bisa berpegang teguh pada aturan yang sudah ada. Hal ini juga sebagaimana poin pernyataan sikap yang sudah disampaikan kedelapan fraksi mengenai tugas KPU untuk bekerja sesuai amanat undang-undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapa pun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. **we/mh**



Oleh:
Moch Edward Trias Pahlevi
Koordinator Umum Komite
Independen Sadar Pemilu (KISP)

Sejumlah perkembangan positif dari sisi pelaksanaan pemilu di antaranya tumbuh suburnya partai politik dibandingkan zaman sebelum reformasi, adanya aturan regulasi yang mendorong peran perempuan di ranah publik, penghapusan perwakilan TNI-Polri di parlemen, diberikan ruang organisasi masyarakat sipil untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu agar pemilu dapat diamati banyak masyarakat yang bertujuan pada aspek transparansi, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu yang mandiri, dan pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara periodik yakni 5 tahunan.

Sementara itu, sejumlah temuan masalah masih saja menghiasi perhelatan demokrasi prosedural (pemilu) di Indonesia. Seperti masih dijumpai adanya praktik money politik (politik uang), adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau permasalahan etik yang menyangkut penyelenggara pemilu, persoalan tidak netralnya ASN, maraknya politik dinasti, dan persoalan-persoalan teknis

Mengkaji Penggunaan Sistem Pemilu di Indonesia

Perkembangan demokrasi Indonesia pasca reformasi 1998 mengalami banyak dinamika pasang surut. Namun, jika dilihat sejauh ini banyak perkembangan positif dalam sisi pelaksanaan demokrasi prosedural (pemilu), walaupun masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki.

kepemilikan. Pada akhirnya banyak pihak yang beranggapan bahwa produk dari pemilu tidak menjamin kepemimpinan yang pro terhadap kepentingan, malah justru dijumpai banyaknya pejabat terpilih dari proses pemilu tertangkap kasus korupsi.

Menilik Penggunaan Sistem Pemilu Di Indonesia

Sejarah munculnya penggunaan sistem proporsional daftar terbuka sebenarnya berangkat dari kritik-kritik yang dilontarkan oleh kalangan pegiat/aktivis demokrasi, akademisi, dan partai politik. Sistem proposional daftar tertutup memiliki kelemahan seperti memilih kucing dalam karung. Artinya, pemilih tidak bisa mempengaruhi langsung keterpilihan caleg. Selanjutnya kritik terhadap sistem proposional daftar tertutup dimana pemilih tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi keterpilihan caleg, disebabkan caleg yang mendapatkan restu oleh partai saja yang mendapatkan tiket ke parlemen

Sementara itu banyak tuduhan terhadap sistem proporsional tertutup untuk mendapatkan restu partai politik agar dapat duduk di parlemen,

kemudian harus ada uang yang diberikan kepada partai politik. Oleh sebab itu, banyak LSM kepemilikan mendorong untuk menerapkan sistem proposional terbuka. Namun, penggunaan sistem proposional terbuka yang sudah diterapkan saat ini tidak juga lepas dari berbagai kritik.

Sistem proposional terbuka dinilai oleh sebagian pihak dianggap seperti pertarungan yang liberal atau pasar bebas. Siapa yang punya modal kuat, mereka yang akan menang. Kemudian banyak pengamat yang konsentrasi pada aspek pemilu dan demokrasi melihat dengan pemilu yang sangat bebas mengakibatkan pemimpin yang terpilih tidak mengedepankan sebuah kualitas namun karena isi dompet dari kandidat. Selanjutnya sistem ini mengakibatkan terjadinya pertarungan di eksternal partai politik namun juga di internal partai politik.

Alhasil, partai tidak memiliki peran yang kuat untuk menentukan kemenangan kandidat karena kemenangan seorang caleg diintervensi oleh suara terbanyak. Dampaknya, yang sering diperbincangkan oleh banyak masyarakat ialah praktik politik uang. Uang menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pundi-pundi suara di

Sejarah munculnya penggunaan sistem proporsional daftar terbuka sebenarnya berangkat dari kritik-kritik yang dilontarkan oleh kalangan pegiat/aktivis demokrasi.

masyarakat, ada ketakutan dari caleg jika tidak melakukan praktik seperti ini akan dipastikan tidak terpilih.

Masyarakat menjadi terbiasa dalam menggunakan hak suaranya tergantung pada uang yang didapatkan. Muncul istilah NPWP (omor piro wani piro), perilaku masyarakat yang seperti ini telah melekat di pemilih Indonesia. Maka, para caleg selalu berpikir mencari sumber daya uang yang besar terhadap para pemilik modal agar mendapatkan modal untuk menyuap masyarakat.

Saat ini, muncul sejumlah pihak dari kalangan partai politik dan pengamat menginginkan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem ini dianggap lebih adanya dorongan untuk penguatan kelembagaan partai politik. Namun, juga tidak sedikit yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. Di Indonesia perdebatan dari kedua sistem ini telah menjadi perdebatan setiap menjelang pemilu. Semua pihak memiliki alasan masing-masing dan atas dasar kepentingannya masing-masing.

Tulisan ini mengusulkan jika pemilu dilakukan secara serentak tahun 2024. Maka, dibandingkan menggunakan sistem proposional terbuka yang berlaku sistem sebelumnya, maka penulis menilai menggunakan proposional tertutup memiliki lebih banyak kelebihan, dan lebih cocok untuk diterapkan pada penyelenggaraan pemilu legislatif secara serentak. Alasannya ialah sistem ini mempermudah aspek pemilihan dan dari sisi penyelenggaraan. Sistem ini mempermudah pada aspek rekapitulasi suara dan penghitungan

suara. Hal ini juga perlu menjadi pertimbangan untuk memilih sistem proposional tertutup untuk dijadikan opsi dengan menggunakan pemilu yang serentak.

Namun, usulan menggunakan sistem proposional daftar tertutup dengan mekanisme pemilu serentak, penulis menyepakati usulan dari Mada Sukmajati yang merupakan Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM yang menurutnya jika menggunakan sistem proposional tertutup, maka perlu pendahuluan atau proses kandidasi terlebih dahulu di internal partai politik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan edukasi agar pemilih mengenal nama-nama yang dicalonkan oleh sebuah partai.

Kemudian untuk memperkuat adanya prinsip tersebut pada proses kandidasi penulis sepakat dengan usulan Mada Sukmajati bahwa perlu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan setiap partai membuat berita acara proses pencalonan. Selanjutnya masyarakat perlu mendorong reformasi terhadap kelembagaan partai politik agar mampu melahirkan sebuah produk kepemimpinan yang baik, atau mendorong partai politik melakukan undang-undang parpol. Revisi undang-undang parpol misalnya ada pembatasan jabatan ketua umum, keharusan transparansi keluar masuk partai, dan isu lain yang perlu diatur.

Jika partai politik mampu melakukan melakukan reformasi terhadap dirinya, maka penggunaan sistem proposional tertutup dengan mekanisme penyelenggaraan

serentak sangat cocok untuk digunakan. Namun, dalam pandangan penulis jika pemilu dilakukan dengan mekanisme terpisah antara legislatif terlebih dahulu dan dilanjutkan eksekutif, maka sistem yang digunakan lebih cocok menggunakan sistem proporsional terbuka.

Hal ini disebabkan ada waktu jeda antara pemilihan legislatif menuju eksekutif. Dari sisi penyelenggara pemilu memberikan ruang waktu untuk mempersiapkan pemilu. Proses rekapitulasi di pemilihan legislatif tidak memakan waktu dan tenaga yang banyak, apalagi saat pemilihan eksekutif (calon presiden dan wakil presiden). Maka, menggunakan sistem proporsional terbuka sangatlah cocok. Atau dengan model pemilu serentak yang moderat akan lebih cocok menggunakan sistem proporsional terbuka.

Artikel ini membayangkan bagaimana skema model pemilu serentak yang lebih moderat dan memperhatikan aspek keseimbangan bagi beban penyelenggara pemilu, aspek pemilihan, dan aspek peserta pemilu. Model keserentakan pemilu yang moderat ialah membagi pemilu dipisah menjadi dua, yakni pemilu nasional dan lokal dengan jarak kurang lebih antara 2,5 tahun atau 2 tahun. Pemilu nasional ini meliputi pemilihan eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden. Kemudian legislatif meliputi DPD dan DPR RI.

Selanjutnya pemilihan lokal yakni memilih eksekutif yang meliputi gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, atau bupati dan wakil bupati. Sedangkan legislatif meliputi DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Model seperti ini akan mempermudah penyelenggara pemilu, hidupnya dinamika politik lokal, dan adanya hasil memperkuat substansi hubungan pusat dan daerah dalam memperkuat sistem presidensial. 🍃

DPR RI Kaji Perppu Ciptaker

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) telah disampaikan pemerintah kepada DPR. Pemerintah memandang Perppu sebagai bentuk antisipasi Indonesia menghadapi krisis global. Perppu Ciptaker kini sedang bergulir di DPR RI.



“

Kita telaah dulu, kemudian tentu saja membuka ruang yang seluas-luasnya kepada publik untuk ikut mencerna dan membaca isi Perppu tersebut. Ya, setelah itu baru kita akan jalankan mekanisme sebaik-baiknya.

Puan Maharani
Ketua DPR RI

Perlu diakui, lahirnya Perppu Ciptaker ini menyebabkan sejumlah polemik di tengah masyarakat Indonesia.

Banyak pihak yang mempertanyakan alasan terburu-buru pemerintah menerbitkan Perppu Ciptaker. Padahal, UU Ciptaker masih dalam masa tenggat perbaikan akibat dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Terbitnya Perppu Ciptaker disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pada hari yang sama, Joko Widodo menyatakan bahwa Perppu ini akan membantu mengobati ketidakpastian hukum untuk para investor. Apalagi, tahun ini, pemerintah menargetkan total investasi di Indonesia mencapai Rp1.400 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menjelaskan, Perppu ini berlandaskan pada asas 'ke daruratan'. Di mana, pemerintah ingin segera

menyelamatkan negara dari ancaman yang menyebabkan 'ke daruratan' tersebut. Makna 'darurat' bagi pemerintah ditandai dengan krisis global akibat ancaman resesi global, perang Rusia dan Ukraina, krisis energi, dan ancaman stagflasi.

Sehingga, menurutnya, jika harus menunggu masa tenggat UU Ciptaker seperti yang diputuskan MK, Indonesia dikhawatirkan akan ketinggalan jauh untuk menyelamatkan diri. Sejumlah pakar meminta agar segenap masyarakat sipil tidak boleh lengah mengawasi proses kajian Perppu Ciptaker di DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku akan menelaahnya sesuai mekanisme. "Kita telaah dulu, kemudian tentu saja membuka ruang yang seluas-luasnya kepada publik untuk ikut mencerna dan membaca isi Perppu tersebut. Ya, setelah itu baru kita akan jalankan

mekanisme sebaik-baiknya," ucap Puan kepada Parlemenaria.

Ia pun menyampaikan pembahasan Perppu Ciptaker di DPR RI akan mempertimbangan berbagai aspek. Satu di antaranya adalah aspek kebermanfaatan dan kegunaan untuk rakyat Indonesia. "Perppu ini nanti bisa bermanfaat dan berguna dan tidak ada lagi hal-hal yang menyalahi aturan, sehingga bisa berlaku," ungkap perempuan pertama sebagai Ketua DPR RI itu.

Diketahui, DPR RI menerima dokumen Perppu Ciptaker secara resmi pada awal Januari 2023 lalu. Selanjutnya, kajian atas dokumen tersebut ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.

Senada, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengungkapkan, dirinya akan ikut mengawasi perkembangan kajian Perppu Ciptaker di DPR RI. Melalui Komisi IX



Tentunya, akan dimonitor terus perkembangannya dan karena ini sudah masa sidang masuk, teman-teman juga bisa memantau di komisi teknis perkembangan-perkembangan mengenai pembahasan Perppu tersebut.

Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI

FOTO: KRESNO/NR

antarfraksi, jelasnya, akan dilakukan pembahasan lintas fraksi. Masing-masing fraksi akan memberikan pandangan soal Perppu Ciptaker. "Masing-masing fraksi sedang melakukan pendalaman dan pembahasan. Setelah itu, tentu akan ada pembahasan lintas fraksi. Pada akhirnya, masing-masing akan memberikan pandangannya," imbuh Saleh.

Saat ini, sejumlah pihak sedang mengajukan permohonan gugatan terhadap Perppu Ciptaker ke MK. Dalam surat permohonan yang diterima MK 5 Januari 2022

DPR RI, Perppu Ciptaker akan dibahas bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Sehingga, publik tetap bisa ikut mengawasi.

Sudah dilakukan rapat kerja komisi terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Tentunya, akan dimonitor terus perkembangannya dan karena ini sudah masuk masa sidang, teman-teman juga bisa memantau di komisi teknis perkembangan-perkembangan mengenai pembahasan Perppu tersebut," pungkas Dasco.

Masih Bergulir

Pada 11 Januari 2023 lalu, Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI membahas Perppu Ciptaker. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, DPR hanya mempunyai hak menentukan sikap keberadaan Perppu Ciptaker. "Kalau kita bicara Perppu, DPR tidak punya hak untuk membahas sebetulnya. Kita hanya bisa menolak atau menerima," kata Charles.

Sepakat, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menerangkan, DPR RI berada pada posisi sebagai lembaga yang menyetujui atau tidak atas terbitnya Perppu tersebut. Namun, ia menjelaskan keputusan yang



Kalau kita bicara Perppu, DPR tidak punya hak untuk membahas sebetulnya. Kita hanya bisa menolak atau menerima.

Charles Honoris
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI



FOTO: MUNICHEN/NR

diambil DPR RI tetap berdasarkan pada kajian yang telah ditetapkan tahapannya oleh perundang-undangan. "Nah, sekarang kita tugasnya di parlemen adalah menguji apakah layak Perppu itu untuk kita setujui atau tidak (menjadi undang-undang)," lugas Maman, sapaan akrabnya.

Selain itu, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga menambahkan bahwa kini tiap fraksi di DPR RI sedang mendalami sekaligus membahas Perppu Ciptaker. Setelah pembahasan

lalu, disebutkan para pemohon mengalami kerugian berupa ketidakpastian hukum setelah Perppu itu keluar.

Akan tetapi, Perppu Ciptaker disebut tetap sah dan mengikat setelah diumumkan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, penentuan penetapan Perppu Ciptaker berada di tangan DPR. Jika disetujui DPR, maka Perppu Ciptaker sah menjadi undang-undang. Namun, jika DPR menolak, maka pemerintah wajib mencabut Perppu Ciptaker.

ts/mh

Perlu Perhitungan Kualitatif Atas Realisasi Anggaran KPC-PEN 2022

Laporan realisasi anggaran kerap disajikan sebatas angka-angka kuantitatif besaran penyerapan. Studi kualitatif mengenai dampak penggunaan dana tak jarang luput dari perhatian.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) tahun 2022 yang mencapai Rp396,7 triliun atau 83,9% dari Rp472,6 triliun yang dianggarkan. Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengingatkan agar realisasi anggaran tak hanya diukur sebatas kuantitas dana yang dikeluarkan, namun perlu ada studi kualitatif untuk mengukur dampak penggunaan anggaran tersebut.

"Pertama, jangan hanya fokus pada nilai dan persentase realisasi anggaran tetapi juga perhatikan impact-nya. Hal ini yang terus luput dari evaluasi anggaran kita. Hanya mencapai target realisasi (belanja) sedangkan kualitasnya jarang dikalkulasi," ujar Anis. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga mengaitkan penggunaan anggaran KPC-PEN yang sumber dananya didapat dari pajak maupun pembiayaan utang. Ia menekankan bahwa upaya-upaya tersebut harus disertai evaluasi penggunaan anggarannya.



FOTO: MUNICHEN/INR



Pertama, jangan hanya fokus pada nilai dan persentase realisasi anggaran tetapi juga perhatikan impact-nya. Hal ini yang terus luput dari evaluasi anggaran kita. Hanya mencapai target realisasi (belanja) sedangkan kualitasnya jarang dikalkulasi.

Anis Byarwati
Anggota Komisi XI DPR RI

"Jadi, pajak yang kita bayar dan pembiayaan dari utang bisa mubazir jika tidak dievaluasi penggunaan anggarannya," tambahnya. Terdapat tiga kluster penggunaan anggaran PC-PEN tahun 2022 antara lain kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Dari tiga kluster yang ada, kluster pemulihan ekonomi merupakan kluster yang mampu menyerap anggaran melebihi pagu yang dianggarkan atau Rp183,4 triliun dari Rp178,32 triliun dana yang disediakan. Salah satu penggunaan dana ditujukan bagi dukungan untuk UMKM termasuk subsidi KUR.

Secara pribadi, Anis memberikan apresiasi terhadap besaran realisasi anggaran, namun ia kembali membubuhkan catatan terutama

terkait UMKM penerima bantuan. Menurutnya, sebaran dan rataan UMKM penerima bantuan, besaran bantuan menjadi beberapa hal yang patut disoroti bersama mengingat Indonesia masih belum memiliki database yang valid terkait UMKM.

"Saya pribadi sangat mendukung realisasi anggaran yang besar dan tinggi. Akan tetapi, perlu dianalisis apakah penerimaan bantuan UMKM sudah merata atau hanya itu-itu saja. Persoalan mendasar di Indonesia adalah data. Saya kira kita belum memiliki data UMKM yang valid dan ini tentu bisa memunculkan pertanyaan baru, yakni tentang realisasi anggaran yang dimaksud," sebagaimana disampaikan politisi PKS kepada Parlemenaria.

Tak Ada Lagi Anggaran KPC-PEN 2023

Sejak paruh kedua tahun 2022, pemerintah telah mengumumkan bahwa tak akan ada lagi dana bagi KPC-PEN di tahun 2023. Hal ini disinyalir berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pada UU tersebut termaktub bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diizinkan melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga tahun atau berakhir pada 2022.

Dilansir dari berbagai sumber, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kerja KPC-PEN akan selesai akhir tahun 2022. Hal ini disampaikan kepada media usai Peluncuran Buku Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, akhir Desember lalu.

Tanpa alokasi khusus bagi KPC-PEN di tahun 2023 membuat sebagian pihak khawatir akan dampak keputusan tersebut. Banyak pihak yang masih merasa dukungan bantuan sosial dan pemulihan ekonomi masih diperlukan, utamanya yang bertujuan melindungi masyarakat dari permasalahan yang masih terjadi, karena dampak ikutan pandemi.

Terkait hal tersebut, Anis melihat bahwa pemerintah sudah memiliki program-program yang fokus pada keluarga-keluarga harapan. Persoalan yang saat ini mendesak untuk diselesaikan, menurut Anis adalah bagaimana pemerintah bisa mengurangi intervensi pada harga-harga barang yang diatur (administered price), sehingga daya beli rakyat tidak terus tertekan.

Menurutnya, dalam transisi pandemi ke endemi, hal utama yang harus dilakukan pemerintah adalah

“

Berkat respon cepat melalui kebijakan gas dan rem, kita tidak hanya mengendalikan pandemi, tetapi juga mempercepat pemulihan ekonomi. Bahkan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi dibandingkan negara lain.

Puteri Komarudin
Anggota Komisi XI DPR RI

FOTO: MUNCHEN/INR



menjaga ketersediaan pasokan dan harga bahan pangan. Perlu dipikirkan apakah program bantuan langsung non tunai dikembalikan ke posisi semula (tunai) agar jaminan terhadap pemenuhan beras atau bahan pokok bagi rumah tangga prasejahtera lebih baik.

Kebijakan Gas-Rem

Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir Desember 2022 lalu. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengapresiasi keberhasilan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dalam mengendalikan wabah pandemi.

Pembentukan KPC-PEN merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadapi kejadian luar biasa Covid-19 yang memberikan dampak ke berbagai lini. Dilansir dari Indonesia.go.id, melalui KPC-PEN, pemerintah secara cepat telah merespons kejadian luar biasa pandemi Covid-19 dengan mengambil langkah-langkah kebijakan "gas dan rem" yang mengintegrasikan antara dimensi penanganan kesehatan dengan dimensi pemulihan ekonomi nasional.

"Berkat respon cepat melalui kebijakan gas dan rem, kita tidak hanya

mengendalikan pandemi, tetapi juga mempercepat pemulihan ekonomi. Bahkan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi dibandingkan negara lain," urai politisi Partai Golkar itu.

Pemerintah menyebut keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan situasi pandemi yang semakin terkendali. Dalam keterangannya, Puteri mengatakan bahwa pengendalian Covid di Indonesia tidak terlepas dari upaya KPC-PEN dalam memutuskan pengadaan vaksin dan percepatan program vaksinasi Covid-19 untuk mencapai kekebalan imunitas. Adapun pengeluaran-pengeluaran terkait vaksin dan tenaga kesehatan berada pada klaster kesehatan KPC-PEN.

Dalam konferensi pers virtual mengenai Realisasi APBN 2022 yang dilakukan pada 3 Januari, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan realisasi KPC-PEN per 30 Desember 2022 mencapai Rp396,7 triliun. Klaster kesehatan yang meliputi belanja penanganan Covid-19, santunan nakes, insentif perpajakan kesehatan, dan beberapa hal lain hanya terserap Rp61,3 triliun dari Rp122,54 triliun yang dianggarkan.

Klaster perlindungan sosial menyerap Rp152 triliun dari Rp154,76 yang dianggarkan. Klaster ini digunakan untuk beberapa peruntukan antara lain BLT BBM, Bantuan Penyandang Disabilitas, YAPI dan lansia serta kartu Pra kerja dan Kartu Sembako. uc/mh

Omnibus Law Kesehatan Harus Cermat dan Hati-hati

Salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Prioritas Tahun 2022 adalah RUU Kesehatan, usulan DPR, khususnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Tahun 2023 ini DPR kembali membahas RUU yang kemudian disebut *RUU Omnibus Law Kesehatan*.

“

Dalam institusi keuangan ada protokol yang jelas. Nah, ini yang belum dimiliki oleh bidang kesehatan kita. Membentuk sebuah lembaga (kesehatan-red) yang persis sama di bidang keuangan.

Supratman Andi Agtas
Ketua Baleg DPR RI



RUU Kesehatan sangat penting sebagaimana diamanatkan konstitusi, khususnya dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Tersedianya pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi sebuah keharusan. Sayangnya, sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang

semakin mahal dan rumit. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan upaya menjamin akses kesehatan yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Atas dasar tersebut, Baleg memandang perlu melakukan perubahan secara komprehensif (penggantian) terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Apalagi, UU Kesehatan termasuk UU yang sering dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan terkait kesehatan, penyusunan regulasi kesehatan diharapkan lebih komprehensif. Penggantian UU Kesehatan dengan metode *omnibus law* menjadi keniscayaan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain RUU tentang Kesehatan, setidaknya ada 10 UU lainnya terkait bidang kesehatan yang harus disinkronisasikan satu sama lain, sehingga menjadi satu UU yang komprehensif. Hal itu tak lain untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan (resiliensi) kesehatan. Diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik yang mencakup pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pendanaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.

Kesepuluh UU (di luar RUU Tentang Kesehatan) bidang kesehatan itu adalah UU No.4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

UU No.44/2009 tentang Rumah Sakit, UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No.18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No.38/2014 tentang Keperawatan, UU No.6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan UU No.4/2019 tentang Kebidanan.

Dalam rapat kerja dengan pemerintah di akhir tahun 2022 lalu, Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa RUU *Omnibus Law* Kesehatan menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan integrasi di sistem kesehatan nasional, bahkan juga menjadi bagian untuk membangun arsitektur kesehatan di Indonesia.

Tak dapat dipungkiri Indonesia kesulitan menghadapi krisis kesehatan. Karenanya, pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional. Dengan kata lain, RUU *Omnibus Law* Kesehatan sebagai bagian upaya dari parlemen dan pemerintah untuk melihat bagaimana membangun sebuah sistem yang integratif. Mulai dari tenaga kesehatannya, tenaga medis, kefarmasiannya, penyediaan alat kesehatannya, hingga sampai proses distribusi.

Sebagaimana sistem keuangan dunia yang ada standar baku dan protokolnya, maka ada baiknya dalam sistem kesehatan pun dibentuk protokol yang jelas. Pasalnya, arsitektur kesehatan negara kita tidak sama dengan arsitektur keuangan dunia yang berlaku.

"Dalam institusi keuangan ada protokol yang jelas. Nah, ini yang belum dimiliki oleh bidang kesehatan kita. Membentuk sebuah lembaga (kesehatan-red) yang persis sama di bidang keuangan," tambah politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Sementara itu Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifah Amalia mengungkapkan bahwa pembahasan *Omnibus Law* RUU Kesehatan itu harus dilakukan dengan

“

Pembahasan *Omnibus Law* RUU Kesehatan itu harus dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati. Karena, dengan mengubah undang-undang kesehatan, maka yang harus dipikirkan pertama adalah apa evaluasinya terhadap sejumlah UU bidang kesehatan lain yang sudah ada.

Ledia Hanifah Amalia
Anggota Baleg DPR RI



sangat cermat dan hati-hati. Karena, dengan mengubah undang-undang kesehatan, maka yang harus dipikirkan pertama adalah apa evaluasinya terhadap sejumlah UU bidang kesehatan lain yang sudah ada.

Kedua, yang juga diperlukan adalah road map-nya nanti akan seperti apa, bagaimana sistem yang akan dibangun, bagaimana konstruksinya, karena jika tidak dikonstruksikan dengan baik, maka nanti hanya akan menambah masalah, bukan memperbaiki. Ketiga, yang juga harus dilihat adalah ada hal-hal yang tidak semata-mata tambal sulam, tapi justru dia harus menjadi satu kesatuan. Oleh karenanya, konstruksi berpikirnya memang sudah harus dipersiapkan.

"Kita tidak bisa sekadar draf yang disusun oleh Baleg, nanti akan dibahas bersama pemerintah. Tapi menurut saya letak dasarnya justru pada naskah akademik dan draf. Karenanya memang jalannya masih panjang dan harus sangat hati-hati, bukan berarti kita tidak mau diubah, banyak yang harus diperbaiki tetapi harus sangat hati-hati dan jeli serta cermat," ungkap Ledia dalam sebuah kesempatan diskusi bersama di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ditambahkan Ledia, UU yang sudah eksis tidak bisa diabaikan. Ada aturan dan hukumnya. Tata aturannya harus sangat teliti dan sangat baik, karena menyangkut hajat hidup orang

banyak, bukan cuma profesi, tapi juga penerima layanan, masyarakat secara umum harus memahaminya.

Politisi Fraksi PKS ini menilai, bobotnya lebih kepada kuratif, karena itu akan berpengaruh kepada skema pembiayaan. Pembiayaan akan jadi sangat berat kalau cuma berpikir kuratif, tidak berpikir promotif preventif. Sesungguhnya promotif preventif itu secara pembiayaan lebih rendah dan masyarakat akan menjadi lebih baik. Kemandirian masyarakat, kesadaran masyarakat dengan perilaku hidup bersih, dan sehatnya akan menjadi lebih baik.

Ledia pun memberikan masukan. Pertama, isu yang sangat krusial dan tidak boleh dilewatkan adalah hak asasi manusia. Di sini harus lebih jelas pembahasannya. Mana yang menjadi kewenangan birokrasi, mana yang menjadi kewenangan organisasi profesi, tentu tidak bisa dijadikan satu. Karena bagaimanapun juga pengaturannya pasti akan berbeda. Seperti halnya wartawan dengan sertifikat standar kompetensinya yang menguji bukan seorang dokter, tapi seorang jurnalis yang ada dalam organisasi profesi.

kepada wartawan menjelaskan bahwa Komisi IX belum membahas RUU *Omnibus Law* Kesehatan,

— ayu/mh



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menerima kunjungan Ketua Majelis Nasional (Parlemen) Republik Korea (Speaker of National Assembly of Republic of Korea) Kim Jin-Pyo ke DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2022).
FOTO: JAKA/MAN



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat melihat dan mengunjungi sejumlah sentra usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Serangan, Bali, Senin (16/1/2023).
FOTO: GERALDI/MAN





Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui massa pengunjuk rasa yang berasal dari para perangkat desa se-Indonesia, di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (17/1/2022). Dalam aspirasinya, para perangkat ke desa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

FOTO: DEVI DAN JAKA/MAN



Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar saat menerima perwakilan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta pada Selasa (10/01/2023).

FOTO: JAKA/MAN





Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Delapan fraksi di DPR RI saat menggelar Konferensi Pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
FOTO: RUNI/MAN



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima foto bersama usal menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Massenrempulu, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/01/2023). Mereka menyampaikan aspirasinya mengenai pengurusan lahan pertanian dan ternak yang dilakukan oleh PTPN XIV, Komisi VI akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan memanggil segera pihak PTPN XIV.

FOTO: JAKA/MAN



Ketua GKSBI Indonesia-Prancis Hetifah Sjaifudien saat bertukar cenderamata usai menerima kunjungan Senat Perancis Mr. Damien Regnard di Ruang Delegasi, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2023). Dalam pertemuan ini kedua belah pihak ingin memastikan kerjasama Indonesia-Prancis menjadi lebih erat lagi. FOTO: OJI/MAN



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat menerima delegasi Amerika Serikat di ruang tamu Pimpinan Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Sugeng Suparwoto menyambut baik rencana Amerika Serikat yang ingin bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam bidang nuklir, terutama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). FOTO: TARI/MAN



Gempita Imlek 2023 Selepas Pandemi

NARASI: DEVI IRIANDI • FOTO: JAKA NUGRAHA

Tradisi perayaan Imlek yang sempat berhenti selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19 akhirnya bisa kembali dilakukan seiring berakhirnya kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022 lalu, menyatakan, mencabut kebijakan PPKM.

Warga keturunan Tionghoa di Indonesia secara suka cita dan antusias menyambut datangnya Tahun Baru Shio Kelinci Air yang punya arti umur panjang, kedamaian, hingga kemakmuran. Tim Parlementaria DPR berkesempatan memotret tradisi kemeriahan Imlek tersebut, antara lain pertunjukkan Barongsai yang merupakan tarian tradisional Tiongkok dengan menggunakan sarung menyerupai singa yang dihadiri ribuan orang di salah satu mal di Kota Tangerang.

Selain itu, perayaan Imlek 2023 di Klenteng Boen Tek Bio Tangerang, Kelenteng Jin De Yuan, dan Wihara Dharma Sakti di Jakarta juga terpantau meriah. Meski demikian pengurus tetap mengimbau menggunakan masker. Selain ibadah bagi jemaat, juga disiapkan sejumlah pertunjukkan yang bisa dinikmati masyarakat umum. Aparat kepolisian turut disiapkan guna memastikan dan menjaga keamanan, agar pelaksanaan perayaan Imlek dapat berjalan lancar dan aman. 🐰





Pengabdian, begitulah Kurniasih Mufidayati menilai langkah karirnya menjadi seorang anggota dewan. Dosen Magister Ilmu Administrasi ini bahkan tak pernah berpikir sebelumnya akan terjun di kancah politik. Menurutnya, bertugas sebagai wakil rakyat merupakan pengabdian seperti yang pernah ayahnya ajarkan.

“Kalau buat saya pribadi ini bukan karir ya, ini pengabdian. Saya kalau diminta mengisi formulir ataupun biodata pekerjaan, saya selalu jawab pekerjaan saya dosen, bukan DPR. Karena ini pengabdian, itu yang selalu diajarkan oleh ayah saya.”

Karir Menjadi Dosen

Berawal dari kegemarannya bergaul dan berkegiatan sosial, Kurniasih muda memutuskan melanjutkan pendidikan sarjananya dengan mengambil jurusan Bahasa Inggris di Institut Keguruan dan

Kurniasih Mufidayati

Pengabdian Seorang Wakil Rakyat



Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang. Tak berhenti hingga sarjana, politisi PKS ini terus menuntut ilmu hingga memperoleh gelar doktor.

Ia memang bermimpi menjadi seorang pengajar. “Cita-cita saya menjadi guru, pengabdian kepada masyarakat. Pengennya berbuat banyak, ya mungkin itu yang ditanamkan oleh kedua orangtua saya,” katanya.

Pernah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengajar pada program Magister Ilmu Administrasi, ia memang tertarik dengan kebijakan publik. Baginya kemajuan dan kemunduran sebuah bangsa, salah satunya dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan publik yang dibuat. Jika kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, maka berhasillah sebuah kebijakan. Menurutnya, saat ini di Indonesia

masih banyak sekali gap yang terjadi antara formulasi dan implementasi sebuah kebijakan. Sehingga, itulah yang mendorong Kurniasih mengajar Ilmu Administrasi. “Memang, saya tertarik dengan kebijakan publik, dengan situasi policy-policy yang ada.”

Masa Kecil Di Pekalongan

Kurniasih kecil lahir dan tumbuh di Pekalongan, Jawa Tengah. Tumbuh di tengah keluarga yang penuh kehangatan, membuatnya sangat mensyukuri kehidupan. Sejak kecil, kedua orangtuanya mendidik Kurniasih kecil dalam lingkungan beragama yang kuat. Bahkan, sejak sekolah dasar, ia sudah mulai menghafal surah-surah dalam Alquran. “Tapi dulu, tuh, enggak merasa terbebani ya, karena kita tuh diajak diskusi, ketika targetnya harus





“Modeling keluarga saya itu benar-benar saya pakai, karena saya sudah melihat dan merasakan sangat support dan bisa menjadikan saya sampai hari ini.”

hafal sekian-sekian gitu,” kenangnya

Selain pendidikan keagamaan, kedua orangtua juga memberikan perhatian khusus terhadap hobi yang dimilikinya. Ia bahkan diberikan fasilitas untuk menunjang hobinya, yakni membaca dan bermusik. Sejak kecil, ia sudah mahir bermain piano dan organ tunggal.

Meski diakui dengan kesibukannya sekarang, Kurniasih sudah jarang melakukan hobi

bermusiknya. Namun, keahliannya dalam bermain alat musik masih sesekali dilakoninya. Anak ketiga dari empat bersaudara ini menyukai musik klasik instrumental.

“Tapi, ya bermain musik menjadi sisi lain hobi saya dari kecil, ya memang ikut vocal grup, ikut lomba-lomba juga. Sometimes di rumah juga masih main. Kadang-kadang, ya dengerin aja. Kalau dulu kita biasanya klasik instrumental ya. Jadi, dari kecil yang sering didengar, ya klasik instrumental,” cerita Kurniasih.

Mengokohkan Keluarga

Dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan kehangatan, Kurniasih menjadikan didikan orangtuanya sebagai contoh baginya dalam mendidik anak-anaknya. Nilai-nilai yang telah diajarkan kedua orangtuanyalah yang kini diajarkan kembali kepada anak-anaknya. “Modeling keluarga saya

itu benar-benar saya pakai, karena saya sudah melihat dan merasakan sangat support dan bisa menjadikan saya sampai hari ini,” katanya sambil tersenyum.

Bagi ibu empat anak ini, kedua orangtuanya adalah teman sekaligus sahabat. Begitulah ia juga ingin menjadi sahabat bagi anak-anaknya. “Karena saya punya modeling dari keluarga saya yang cukup homey banget, terus hangat banget. Mama

“Yang penting buat saya ke anak-anak itu, agama nomor satu, kalau prestasi itu nomor dua. Yang penting agama, Insyaallah kalau akhirnya dapet, dunianya akan dapet juga.”

Kepada pembaca, khususnya perempuan, Kurniasih berpesan untuk terus mengokohkan dan menguatkan keluarga. Sebab, kokohnya keluarga dapat menjadikan kita pribadi yang kokoh serta menguatkan eksistensi dan peran kita di masyarakat.

saya itu jadi temen buat saya, karena udah kayak sahabattlah. Itu saya terapkan di rumah. Jadi, saya suka ngobrol dengan keluarga," cerita mantan Anggota DPRD DKI Jakarta tersebut.

Salah satu yang terpenting diterapkan Kurniasih dalam mendidik anak-anaknya adalah agama. "Yang penting buat saya ke anak-anak itu, agama nomor satu, kalau prestasi itu nomor dua. Yang penting agama, Insyaallah kalau akhirlatnya dapet, dunianya akan dapet juga."

Selain itu, wanita kelahiran Pekalongan 19 Februari 1970 ini meyakini support keluarga merupakan hal yang sangat penting. Untuk itulah ia selalu memiliki 'premium time' untuk keluarganya. Sebab, support itulah yang nantinya akan menghadirkan keberkahan

Kepada pembaca, khususnya perempuan, Kurniasih berpesan untuk terus mengokohkan dan menguatkan keluarga. Sebab, kokohnya keluarga dapat menjadikan kita pribadi yang kokoh serta menguatkan eksistensi dan peran kita di masyarakat.



Menjadi Anggota Dewan

Sebelum menjadi Anggota DPR RI, wanita yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi IX ini juga pernah berkiprah di DPRD DKI Jakarta. Dari pengalamannya tersebut, ia mengakui tantangan menjadi anggota dewan adalah harus memiliki niat yang kuat dan lurus. Sebab, amanah yang perlu dijaga saat menjadi anggota dewan tidak hanya datang dari rakyat, namun juga dari Tuhan

Menjaga niat tersebut, merupakan hal yang penting, selain kompetensi dan pengetahuan. "Niatnya tidak boleh untuk kepentingan pribadi,

“Niatnya tidak boleh untuk kepentingan pribadi, tapi niatnya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa dan negara. Penting itu menjaga niat.”

tapi niatnya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa dan negara. Penting itu menjaga niat," ucapnya.

bia, rmm, skr/mh

Menyorot Kembali Anggaran Pertahanan

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mendukung penyeimbangan alokasi anggaran pertahanan Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Sebab, wilayah tersebut memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang sangat strategis terutama untuk lalu lintas di area Pasifik. Untuk itu, Komisi I DPR akan memastikan bahwa proporsi dan alokasi anggaran pengembangan alutsista di Indonesia Timur ini memadai.

“Kita ini sebagai pembuat kebijakan sering dikejar dengan pertanyaan, kenapa Indonesia Timur sulit sekali mengejar ketertinggalan dari Indonesia bagian barat. Jawabannya ternyata sangat tidak sederhana. Salah satunya adalah keberpihakan anggaran alutsista belum besar terhadap Indonesia Timur. Sebagian besar anggaran APBN untuk Indonesia Timur untuk dana otonomi khusus dan dana perimbangan pusat ke daerah dalam bentuk transfer,” ungkap Farhan saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR di markas Komando Operasi Udara III (Koopsud



FOTO: JAKA/NR

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan saat mengikuti Kunker Reses Komisi I DPR mengunjungi markas Koopsud III di Biak, Papua.

III), Biak, Papua, Sabtu (17/12) lalu.

Menurut Politisi F-NasDem ini, bentuk keberpihakan anggaran sampai saat ini belum terwujud. Karena keberpihakan anggaran alutsista di Indonesia Timur masih bersifat parsial. “Ketika kita hanya memprioritaskan Indonesia Timur, kita juga tidak menomorduakan Indonesia bagian tengah dan barat. Ya tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan keberpihakan anggaran untuk Indonesia Timur,” terang Farhan.

Yang menarik, kata Legislator Dapil Jabar I ini, mengenai kesejahteraan prajurit di Koopsud III ini, seperti perumahan, sudah sangat memadai. Semuanya secara perlahan sudah mendapatkan perumahan dan renovasinya berjalan lancar. Jumlah personel TNI yang ada di wilayah itu juga tidak banyak. “Mereka lebih banyak membutuhkan sarpras ke penambahan kapasitas bandara dan

juga penambahan keamanan bandara karena yang sekarang lebih banyak bandara untuk sipil. Jadi, memang salah satu tugas utama dari Koopsud III ini adalah memastikan fasilitas sipil itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ucap Farhan.

Di Belawan, Sumatera Utara, delegasi Komisi I DPR menyambangi Pangkalan Utama TNI AL I (Lantamal I). Ketua delegasi Meutya Viada Hafid mengapresiasi kinerja Lantamal I ini di tengah keterbatasan anggaran. “Kinerjanya baik dalam keterbatasan dan kemampuan mereka. Namun, seharusnya mereka bisa melakukan jauh lebih baik lagi mengawasi kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Sumatera Utara yang tangguh terhadap berbagai kerawanan dan ancaman,” jelasnya, usai memimpin pertemuan, Jumat, (16/12/2022) lalu.

Lantamal I Belawan merupakan Pangkalan TNI AL terbesar di



FOTO: HANUM/NR

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid saat memimpin pertemuan Kunker Komisi I DPR RI ke Pangkalan Utama TNI AL I (Lantamal I).

Indonesia. Dengan salah satu tugas pokoknya menyelenggarakan patroli keamanan laut di wilayah kerja Lantamal I dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut di wilayah kerjanya. Komisi I ingin memastikan keamanan laut di wilayah kerja Lantamal I berjalan baik, tanpa hambatan.

"Lantamal I Belawan ini posisinya sangat strategis, yaitu mengawasi

Selat Malaka. Salah satu selat yang paling sibuk sedunia. Jadi kita (Komisi I DPR RI) ingin secara berkala mengawasi seperti apa kemampuan dari Lantamal I Belawan dalam ikut mengamankan jalur-jalur kita," kata Politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I.

Terakhir, Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) itu pun berharap Lantamal I Belawan

tetap bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya di tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki. Khususnya dalam menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Sumatera Utara dan keamanan nasional di laut perbatasan.

Sementara itu delegasi Komisi I DPR yang berkunjung ke Pangkalan TNI AL di Semarang, Jawa Tengah mendukung agar ada kenaikan kelas dari B menjadi A. ini dipandang penting, karena terkait dengan pertahanan negara. Apalagi, 70 persen wilayah Indonesia adalah lautan. Setidaknya inilah yang disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan.

"Kita mendukung usulan kenaikan kelas Lanal ini. Kemudian Pos TNI AL (Pospal) yang selama ini masih menumpang, agar diberikan kesempatan. Kemudian kesejahteraan mereka juga harus kita dukung," ungkap Sturman, di Lanal Semarang, Senin (12/12/2022) lalu.

Lebih lanjut ia bilang, dukungan ini tidak hanya untuk Lanal Semarang saja, namun untuk seluruh Lanal di Indonesia agar melaksanakan pembinaan potensi maritim dan masyarakat pesisir guna mendukung kekuatan pertahanan negara. Apalagi Indonesia dianugerahi tujuh belas ribu pulau yang perlu dipertahankan kawasannya.

Tak hanya soal peningkatan kelas Lanal, ia juga mendukung peningkatan kesejahteraan berupa peningkatan tunjangan personil Babinpotmar Lanal Semarang dan sejumlah kebutuhan prioritas dalam mendukung pelaksanaan tugas Lanal Semarang. Misalnya, penambahan unit kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung (alpung), alat komunikasi (Alkom), dan sarana-prasarana pendukungnya.

jk, hnm, skr/mh



FOTO: SINGGIH/NR

Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan saat memimpin Tim Kunspek Komisi I DPR RI ke Lanal Semarang.

Memperhatikan Tenaga Honorer



FOTO: NADHEN/NR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI ke Kota Bandung.

Sekali lagi Komisi II DPR RI menyorot kembali nasib para tenaga honorer. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mendesak pemerintah segera memberikan kepastian nasib bagi para tenaga honorer. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014, instansi pemerintah, baik pusat atau daerah tidak diperbolehkan lagi merekrut tenaga honorer.

U tersebut juga menyebutkan bahwa pegawai pemerintah hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saan berharap pemerintah menyelesaikan masalah tenaga honorer dengan memperhatikan kesejahteraannya. Apalagi, banyak tenaga honorer yang sudah mengabdikan puluhan tahun untuk negara.

"Kita berharap yang non ASN itu memiliki kepastian terkait dengan status masa depan mereka. Seperti

apa nantinya status mereka itu harus ada kejelasan," ujarnya usai Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (19/12/2022) lampau.

Komisi II sendiri, lanjut Saan, terus mengawal permasalahan tenaga honorer. Kunker kali ini menjadi salah satu realisasi mengawal permasalahan itu. Melalui Kunker ini, Komisi II banyak mendapatkan informasi tentang permasalahan tenaga honorer di Jawa Barat. Salah satu permasalahan tenaga honorer di Jawa Barat adalah banyaknya

tenaga honorer yang sudah berusia sepuh. Menanggapi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, sepuhnya usia para tenaga honorer itu yang membuat mereka kurang paham dengan sistem tes daring untuk ikut seleksi menjadi ASN.

Hal itu yang kemudian menyulitkan para tenaga honorer beralih menjadi ASN. Mereka tak paham teknologi. Namun, Setiawan mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar tidak habis akal. Para tenaga honorer di lingkungan mereka dibuatkan simulasi tes *online* dengan nama ASN Juara. Tes tersebut dibuat semirip mungkin dengan tes *online* ASN. Setiawan berharap agar ke depan, para honorer, khususnya yang kurang paham teknologi, akan siap jika satu waktu ada tes untuk menjadi ASN.

Sementara di Kalimantan Selatan, delegasi Komisi II DPR RI menyorot soal mafia tanah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, persoalan mafia tanah memang sudah terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya, Komisi II DPR meminta agar Menteri ATR/BPN membuat satu sistem yang baik dan terarah dalam mendukung eksistensi Satgas Mafia Tanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Kita sudah mendengar bahwa masalah mafia pertanahan memang terjadi di mana-mana. Oleh karena itu kami dari Komisi II akan tetap meminta kepada Menteri ATR BPN supaya betul-betul membuat satu sistem, yakni kalau memang ada Satgas Mafia Tanah maka harus dibuat satu basecamp atau kantornya," ungkap Junimart saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (16/12/2022) silam.

Ia juga menyatakan, Komisi II DPR akan melakukan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai apa yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum selama ini. "Seperti yang diungkapkan oleh Polda Kalsel, ketika mereka memanggil seorang notaris maka notaris itu tidak akan datang memenuhi panggilan sebelum ada izin dari Ikatan Notaris Indonesia. Ini menjadi kendala. Tadi saya katakan agar pihak kepolisian menggunakan saja pasal perintangan. Jadi kita jangan berkuat di masalah izin dari organisasi," tegasnya.

Selain itu, lanjut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, yang juga menjadi kendala kepolisian adalah masalah warkah tanah. Ketika mereka meminta warkah tanah tetapi warkah tersebut tidak ada. "Inilah yang menjadi masalah selama ini, sebab ketika warkah diminta, warkah tersebut tidak ada. Disamping masalah lain seperti terbitnya dua sertifikat yang sama tetapi menunjuk obyek tanah yang salah. Padahal, di obyek tanah tersebut telah terbit sertifikat jauh-jauh hari sebelumnya," ucap Junimart.

Ia menyampaikan, kendalanya ada di Permen Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan. "Kalau memang semangat dari Presiden Joko Widodo



FOTO: NADHEN/NIR

Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Bandung.

terkait masalah pertanahan itu bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh Menteri ATR BPN, maka sederhana saja langkahnya, benahi ke dalam, perbaiki sistemnya, komunikasi dengan lembaga-lembaga lain yang bisa mempercepat penuntasan masalah mafia tanah ini," kata Junimart.

Sementara Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi mengapresiasi sistem *digital government* yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyatakan, sistem tersebut patut dicontoh oleh berbagai instansi lain pemerintah. Hal tersebut dia ungkapkan usai

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut Komisi II mendapat paparan tentang bagaimana reformasi birokrasi di instansinya.

"Secara umum inovasinya sudah bagus ya. Ada pendekatan-pendekatan digital, *e-government* yang memang sudah seharusnya karena tren ke depan seperti itu," ujarnya, Senin (19/12/2022) lalu. Lebih lanjut, Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa digitalisasi dalam layanan pemerintahan adalah sebuah keniscayaan. Hal itu juga bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai hal.

"Ini menjadi contoh buat pemerintah dan yang lainnya. Supaya nanti pelaksanaan digitalisasi atau kaitan dengan *e-government* ini juga semakin bagus, semakin efektif, dan juga semakin efisien," kata Teddy. Pemprov Jabar pada tahun 2021 sudah berhasil melampaui target Indeks Reformasi Birokrasi. Pemprov Jabar mendapat nilai indeks 78,68 dalam kurun waktu 2018-2021. Salah satu penunjang target itu adalah mudahnya akses layanan publik dan digitalisasi layanan menjadi faktor pendukungnya. **ndn, dep/mh**



FOTO: DEP/NIR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan.

Perdagangan Manusia Masih Tinggi Di Sulut

Perdagangan manusia (*human trafficking*) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ternyata masih tinggi. Delegasi Komisi III DPR RI yang berkunjung ke Sulut menyerukan agar ada tim khusus yang dibentuk untuk mencegah perdagangan manusia.



Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat mengikuti pertemuan Kunker Reses Komisi III DPR RI di Mapolda Sulawesi Utara.

Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta Polda Sulut membentuk tim khusus untuk mencegah dan mengungkap kasus perdagangan manusia di Sulut. Sebab, menurutnya, kasus perdagangan manusia di Sulut angkanya masih cukup tinggi.

"Harapannya, Polda Sulut memiliki konsentrasi dan membentuk tim," kata Santoso usai Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sulut beserta jajaran dan Kepala BNN Provinsi Sulut, di Mapolda Sulut, Senin (19/12/2022) silam.

Santoso menjelaskan, kasus *human trafficking* ini sangat merugikan masyarakat. Selalu ada perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan paksa dalam kasus ini. Hal itu dilakukan

oknum dengan cara penipuan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. "Kejadian-kejadian *human trafficking* menyebabkan kerugian masyarakat di wilayah Sulawesi Utara," ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Oleh sebab itu, Santoso menekankan agar Polda Sulut dapat memberikan atensi khusus terhadap kasus *human trafficking* ini. "Polda Sulawesi Utara dapat menangani, meminimalisir kasus *human trafficking*," tutup Santoso.

Sebelumnya, Kapolda Sulut, Irjen Pol. Setyo Budiyanto dalam laporannya menyampaikan telah mengungkap kasus *human trafficking* dengan total 34 WNI korban perdagangan orang di Kamboja. "Asesmen 34 WNI korban perdagangan orang di Kamboja oleh NCB Interpol Indonesia, Dit Reskrimun Polda Sulut dan Kepolisian Kamboja

yang berada di Phnom Penh. Setelah asesmen, mereka dibawa ke KBRI Kamboja dan selanjutnya difasilitasi hingga kembali ke Indonesia," ujar Setyo.

Sementara di Bandung, Jawa Barat, delegasi Komisi III DPR RI menyorot soal anggaran penanganan perkara yang dinilai masih minim bila dibandingkan dengan jumlah perkaranya. Adalah Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang mengemukakan persoalan ini. Menurutnya, ada banyak perkara yang mundur ditangani lantaran keterbatasan anggaran tersebut.

"Kalau melihat anggarannya, di Pengadilan Tinggi saja untuk menyelesaikan perkara-perkara tingkat banding saja tidak memadai. Ini menjadi catatan kita dalam pengawasan. Komisi III akan melakukan rapat dengan Sekretaris Mahkamah Agung, aspirasi ini



FOTO: SINGGIH/NR

Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat mengikuti Kunker Reses Komisi III DPR RI di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung.

harus kita sampaikan," ujar Cucun kepada **Parlementaria**, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI dengan Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan TUN Bandung, Pengadilan Militer II-09 Bandung, di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung, Senin (19/12/2022) lalu.

Karena itu, menurutnya, anggaran penyelesaian perkara ini perlu evaluasi. Biaya pendaftaran perkara selama ini hanya Rp10.000. Tentu tidak cukup untuk menangani satu perkara di pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Dikatakan Politisi PKB tersebut, hampir di semua daerah di Indonesia anggaran perkara sangat minim. Perlu segera evaluasi



FOTO: ANDRI/NR

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memimpin pertemuan di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.

agar perkara-perkara yang ditangani pengadilan tidak menumpuk.

Di DKI Jakarta tim Kunker Komisi III DPR RI berkunjung ke Kantor Wilayah Kemenkum HAM Provinsi Jakarta. Ahmad Sahroni yang memimpin delegasi ini memberikan komitmen dan dukungan untuk perbaikan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kemenkum HAM DKI Jakarta.

"Saya berharap pelayanan keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terus ditingkatkan agar terwujud pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya di Kantor Kemenkum HAM DKI Jakarta Kamis (15/12/2022) lampau. Hal penting yang turut diapresiasi, yaitu kerja Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang berkinerja dengan baik dan minim masalah.

Komisi III DPR RI juga mendengarkan permasalahan yang disampaikan satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta. Menurut Sahroni, ada beberapa permasalahan penting yang dipaparkan Kepala Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, yaitu sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Politisi Partai NasDem Dapil DKI Jakarta III ini berharap, Kepala Kanwil dan jajarannya dapat menindaklanjuti pengaduan masyarakat, baik terkait unit pemasyarakatan maupun imigrasi. Pelayanan publik tegasnya, harus ditingkatkan untuk meminimalisasi keluhan. "Hal tersebut menjadi poin penting evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta. Kami akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan langsung ke UPT demi terwujudnya pelayanan terbaik kepada masyarakat," harapnya.

qq, skr, man/mh

Mengupayakan Dana CSR Untuk Pertanian



FOTO: EKI/NR

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi saat melakukan tinjauan lapangan saat Kunker Reses Komisi IV DPR RI di Desa Bayung Gede.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendorong agar dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari seluruh BUMN Pupuk diarahkan untuk para pelaku pertanian, perkebunan, dan, hortikultura. Sehingga, para pelaku tersebut bisa membeli pupuk non subsidi.

Pria yang kerap disapa Kang Dedi ini menyayangkan, selama ini BUMN kurang tepat dalam menyalurkan dana CSR-nya.

Menurutnya, dana CSR semestinya diarahkan sesuai konteks dari bidang usaha yang dijalankan BUMN itu.

Hal itu Dedi sampaikan Selasa (20/12/2022) silam, saat merespon keluhan para petani jeruk saat melakukan tinjauan lapangan pada Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi IV DPR RI di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani,

Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Para petani jeruk mengeluhkan tidak ada subsidi pupuk untuk budidaya jeruk.

Lebih jauh, mantan Bupati Purwakarta itu mengapresiasi masyarakat Bali yang hingga kini masih konsisten menjaga tradisi. Dia menuturkan, biasanya ketika masyarakat tertinggal, lalu loncat ke tren modernisme, maka yang terjadi tradisinya tidak terawat dan modernismenya tidak tercapai.

"Saya mempelajari Bali. Di sini tradisi tetap dipelihara dan dijaga. Akhirnya apa? Akhirnya rakyat

produktif dengan tradisi. Maka lahirlah tradisi berkebun jeruk, tradisi berkebun cabai rawit, pelihara sapi, pelihara ayam. Ketika Bali punya semuanya, maka lahirlah ke pasar. Harga-harganya lebih murah daripada di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Itulah uniknya Bali," pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Di Palembang, Sumatera Selatan, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menilai, program kampung iklim (proiklim) sangatlah bagus. Namun, belum ada desain bahkan dari awal perjalanannya murni dari inisiasi dan kesadaran masyarakat. Slamet menyampaikan ini usai dialog dengan warga Kampung Pro Iklim Sugiwaras RW 02 Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarame, di Palembang. Jumat (16/12/2022) lalu.

"Program ini secara prinsip bagus tetapi jangan sampai implementasinya muncul dari kesadaran masyarakat. Kita tidak ingin itu, tetapi by design, perencanaan harus bagus, sehingga betul-betul menjawab perubahan iklim dengan

“

Ketika Bali punya semuanya, maka lahirlah ke pasar. Harga-harganya lebih murah daripada di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Itulah uniknya Bali.

Dedi Mulyadi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI



FOTO: ARIEF/NR

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet saat berdiskusi dengan warga Kampung Pro Iklim Sugiwaras RW 02 Kel. Talang Jambe, Kec. Sukarame Palembang.

serius dan dibuktikan dengan anggaran yang keluar,” kata Slamet.

Politisi Fraksi PKS ini juga menjelaskan, dalam dialog dengan warga kampung iklim, pihaknya melihat bahwa warga telah menerima sejumlah sertifikat dan penghargaan dari pemerintah yang notabene merupakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Pertamina sebagai bentuk tanggung jawab kepada lingkungan.

“Kesimpulan yang sudah kita

rangkum, temuan temuan lapangan ini kita tindak lanjuti. Itu nomenklatur anggarannya sudah ada, ternyata belum ada peran sama sekali dari KLHK. Bahkan, itu peran dari CSR Pertamina yang secara tanggung jawab strukturalnya lebih kepada tanggung jawab kepada lingkungan,” pungkas Slamet.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana (Sarpras)

penunjang bagi nelayan pada program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini, menurutnya, harus disusun dengan melibatkan dan memberikan manfaat bagi aktor utama di bidang kelautan perikanan, yakni nelayan dan petani ikan.

“Kami mendorong pemerintah pusat, baik secara kebijakan maupun anggaran untuk membantu Kabupaten Pangkep yang memiliki kontribusi besar bagi para nelayan,” ujar Andi kepada **Parlementaria** usai Kunker reses Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Jumat (16/12/2022) lalu.

Menurutnya, potensi dan peluang sektor perikanan yang sangat besar tersebut akan menjadi sangat percuma jika tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadai serta komitmen para pejabat. Pengelolaan yang baik, tambahnya, juga bukan berarti mengeksploitasi sumber daya ikan semau-maunya tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Sarana dan prasarana yang baik, sesuai dengan aspirasi para nelayan, adalah dari sisi jembatan, administrasi, serta sektor perikanan lainnya untuk mendukung tingkat ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan. Karena itu, politisi Fraksi PKS ini meminta pemerintah pusat membantu kelengkapan sarana dan prasarananya.

“Misalnya tadi ada pelabuhan untuk sandaran kapal para nelayan, ada juga aspirasi tentang jembatan. Sehingga, kita bisa memastikan bahwa nelayan merasa terlayani dengan baik, sehingga pembangunan sektor kelautan perikanan kita bisa berkembang,” tegasnya. — **eki, afr, gys/mh**



FOTO: BALGYS/NR

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin saat mengikuti Kunker Reses Komisi IV DPR RI Pelabuhan Perikanan, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.

Bantuan Perumahan Untuk Wilayah Timur Indonesia

Wilayah Indonesia bagian timur mendapat perhatian dari Komisi V DPR RI soal akses pembangunan perumahan yang layak huni. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diserukan agar adil membangun perumahan layak huni yang masif untuk masyarakat di kawasan timur Indonesia.



FOTO: BUNGA/NR

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kota Ambon.

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meminta Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus adil hingga menjangkau wilayah timur Indonesia. Sehingga, BSPS ini dapat dirasakan kehadirannya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Sudewo menyorot program BSPS ini di Desa Tulehu, Pulau Ambon, Maluku. Penghuninya telah bertahun-tahun menempati rumah yang tidak layak huni. Sudewo menjelaskan, masyarakat di desa itu merupakan pengungsi dari dampak gempa yang terjadi pada 2019 lalu. Padahal, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun

2022 terkait Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) telah mengatur hal tersebut, namun hingga kini belum kunjung mendapat bantuan dari pemerintah, katanya Senin (19/12/2022) lalu.

"Kami lihat banyak rumah yang kondisinya tidak layak huni. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat yang saat ini sedang gencar memperhatikan penanganan kondisi kemiskinan ekstrem. Rumah-rumah yang ekstrem banyak berada di sini, dan sangat disayangkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jendral Perumahan justru konsentrasinya di Pulau Jawa. Kami pikir perlu mendapat perhatian lebih, karena ini tidak sekadar menangani rumahnya tetapi juga menangani infrastrukturnya, ketersediaan airnya, begitupun

sanitasinya," ucapnya di Ambon.

Ditegaskan politisi Partai Gerindra itu, Indonesia ini sangat luas, tidak hanya Jawa, melainkan pedalaman dan pulau terluar Indonesia. Jadi, membangun itu harus ada asas keadilan dan pemerataan. Jangan terkonsentrasi hanya di satu titik saja. Komisi V mendesak agar pembangunan rumah layak huni di Indonesia timur tidak luput dari perencanaan anggaran untuk kementerian dan lembaga.

Masih menyorot Kementerian PUPR, kali ini bencana banjir yang menimpa warga Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara jadi perhatian Komisi V DPR saat berkunjung ke Sumut. Anggota Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu mendorong Kementerian PUPR bergerak cepat menangani



FOTO: TIARA/NR

Anggota Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kabupaten Sergai, Sumatera Utara.

banjir yang menimpa warga setempat.

Ada lima kecamatan di Kabupaten Sergai terendam banjir yang diakibatkan sedimentasi yang tinggi hingga mengakibatkan penyempitan badan sungai. Hal ini tidak lepas dari pengaruh faktor alam. "Kami sangat prihatin atas kondisi banjir di Kabupaten Sergai ini. Banyak rumah terendam. Kita dukung penuh Kementerian PUPR agar secepat mungkin membantu Pemerintah Kabupaten Sergai untuk mengatasi banjir yang tiap tahun selalu terjadi."

ungkap Bob di Sergai, Sumut, Jumat (16/12/2022) silam.

Meski demikian, ia turut mengapresiasi langkah-langkah dan inisiatif yang dilakukan oleh Pemkab Sergai dalam menjalin kerja sama dengan *stakeholder* melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Menurutnya, di tengah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, tidak membuatnya menyerah pada kondisi yang terjadi untuk aktif mencari alternatif.



FOTO: BIANCA/NR

Anggota Komisi V DPR RI Muh. Aras meninjau kesiapan infrastruktur menyambut libur Nataru saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR ke Bali.

Sebelumnya, Bupati Sergai Darma Wijaya berharap kedatangan tim Komisi V DPR RI ke Sergai membawa angin segar dan dapat membantu persoalan banjir yang kerap terjadi tiap tahun di Kabupaten Sergai. "Saat ini kami sangat membutuhkan pertolongan. Selama ini, kami dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perusahaan-perusahaan sudah kami lakukan penggalangan dana dari *Corporate social responsibility* (CSR) untuk normalisasi sepanjang 5 kilometer. Kami berharap kedatangan Komisi V DPR ke Sergai ini membawa kabar gembira bagi kami," harapnya.

Sementara di Bali, delegasi Komisi V DPR menyorot soal kesiapan infrastruktur menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang sudah berlalu. Anggota Komisi V DPR Muh. Aras mengapresiasi kesiapan infrastruktur di Bali jelang Nataru yang lalu. Diketahui, Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara. Sehingga, program pembangunan infrastruktur dan transportasinya harus fokus pada peningkatan konektivitas, aksesibilitas, layanan transportasi, hingga keselamatan dan keamanan.

"Kita lihat bahwa seluruh infrastruktur yang telah disiapkan oleh Pemda dan kementerian mitra Komisi V ini ada keseriusan dalam melaksanakan pelayanan yang terbaik untuk menyambut Nataru. Oleh karenanya tentu kita mengapresiasi kesiapan mereka," nilai Aras di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR ke Bali, Jumat (16/12/2022) lampau.

Meskipun dinilai telah memiliki kesiapan yang baik, namun legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini mengingatkan, perlu penataan-penataan yang lebih detail terkait infrastruktur dan transportasi di Bali. Sehingga, tidak ada tumpang tindih dalam pelayanan. — **bif, tra, bia/mh**

Mengawasi Dan Melihat Produktivitas BUMN



FOTO: UBED/NIR

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Minggu (18/12/22).

PT. Inalum diserukan agar memberi kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Inalum dinilai belum maksimal berkontribusi bagi masyarakat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Demikian ketika Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengemukakan hal ini dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VI ke Sumut.

Kontribusi yang dimaksud adalah berperan aktif dalam bidang pendidikan sekaligus membangun sarana dan prasarannya. "Kalau kita lihat di Paritohan ini memang banyak masyarakat Batak yang menginginkan pendidikan yang terbaik. Kita tadi mengusulkan bagaimana Inalum berperan mengirimkan anak-anak di kawasan Danau Toba ini ke perguruan

tinggi atau sekolah-sekolah unggulan melalui beasiswa," tutur Martin Minggu (18/12/22) lalu.

Legislator dari Dapil Sumut II tersebut juga menyoroti teknologi modifikasi cuaca yang digunakan PT. Inalum untuk meningkatkan debit air Danau Toba. Ia meminta agar penggunaan teknologi tersebut tidak berdampak buruk terhadap tanaman atau kebun masyarakat ketika curah hujan dinaikkan. Ketika curah hujan

bertambah, tetapi aliran sungainya tidak baik dan pohon-pohon sudah banyak yang gundul, teknologi modifikasi cuaca ini malah akan menjadi bencana.

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus juga menegaskan perlu ada keadilan bagi masyarakat yang terdampak terhadap operasional PT Inalum. Ia menginginkan kontribusi jangka panjang pada bidang pendidikan dengan mendirikan politeknik atau balai pelatihan kerja. "Atau hal-hal yang menyangkut kebutuhan vital, seperti fasilitas kesehatan serta dukungan peningkatan ekonomi. Itu yang perlu dipacu lebih banyak," ungkap Deddy.

Direktur Operasi dan Portofolio PT Inalum, Danny Praditya memaparkan, saat ini PT. Inalum memiliki beberapa program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Salah satunya menyalurkan dana dengan total Rp71,7 miliar untuk bidang pendidikan dan pelatihan. Selain itu, PT Inalum juga menyalurkan dana Rp17,2 miliar untuk pelestarian alam dengan program penanaman pohon di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, konservasi pantai, dan keanekaragaman hayati.

Sementara di Padang, Sumatera Barat, Komisi VI DPR RI menyambangi PT. Semen Padang di Padang. Ada rencana pengembangan Pabrik Indarung I sebagai cagar budaya. Komisi VI DPR RI pun mendukung rencana pengembangan Pabrik Indarung I sebagai cagar budaya dan destinasi objek wisata. Hal itu lantaran pabrik ini merupakan situs bersejarah sebagai Pabrik Semen Pertama di Asia Tenggara yang patut dijaga.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai, Pabrik Indarung I milik PT Semen Padang ini patut dijadikan sebagai cagar budaya. Hal itu dilihat

Blok Rokan Jadi Tulang Punggung Lifting Nasional



FOTO: HUSEN/NR

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memberi sambutan pada Fokus Group Discussion dengan SKK Migas dan Pertamina di Pekanbaru, Riau.

Blok Rokan di Provinsi Riau kini dipandang sebagai tulang punggung lifting nasional. Bila blok ini terganggu, maka lifting minyak nasional ikut terganggu. Ada sekitar 163 ribu barel per hari produksi minyak yang dihasilkan dari Blok Rokan.

Pandangan ini disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memberi sambutan pada *Focus Group Discussion* dengan SKK Migas dan Pertamina di Pekanbaru, Riau, Jumat (16/12/2022) silam, dalam rangkaian kunjungan kerja. "Blok Rokan menjadi salah satu tulang punggung lifting nasional. Akhir-akhir ini sudah menggembirakan yang dulu dikelola oleh Chevron. Pada 8 Agustus 2021 diserahkan kepada Pertamina,

karena Pemerintah Indonesia mengambil keputusan tidak memperpanjang Chevron," katanya.

Sebelumnya, selama 50 tahun ladang minyak di Blok Rokan dikelola PT Chevron Pacific Indonesia. Keberadaan Blok Rokan sangat penting di tengah banyak blok yang sudah menua. Apalagi, sambung Sugeng, konsumsi BBM terus meningkat. Maka, produksi minyak dari Rokan sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri.

“

Blok Rokan menjadi salah satu tulang punggung lifting nasional. Akhir-akhir ini sudah menggembirakan yang dulu dikelola oleh Chevron. Pada 8 Agustus 2021 diserahkan kepada Pertamina, karena Pemerintah Indonesia mengambil keputusan tidak memperpanjang Chevron.

Sugeng Suparwoto
Ketua Komisi VII DPR RI

"Konsumsi BBM terus naik, sementara blok-blok kita sudah relatif tua. Yang termuda ada di blok Cepu dan Banyu Urip. Terganggunya Blok Rokan, maka terganggunya lifting nasional, karena produksinya besar 163 ribu barel per hari. Blok Cepu dan Banyu Urip sudah menurun. Sekarang tinggal 150-an ribu barel per hari. Sudah tidak sampai 160 ribu lagi," ungkap Politisi Partai NasDem tersebut.

Sementara itu, masih di Riau, tim Kunker Komisi VII DPR menyoal cukai plastik. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menilai bahwa dengan diterbitkannya aturan tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yang salah satu target penerimaannya berasal dari cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK)



FOTO: CHASBI/NIR

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.



Penggunaan industri plastik di Indonesia cukup tinggi, sampai hari ini untuk produksi dari bahan baku masih lebih tinggi import daripada barang-barang produk lokal. Selain harga yang bersaing produsennya pun juga tidak banyak. "Tentunya terkait cukai plastik pada 2023 kita akan bahas dengan Kementerian terkait, insyaallah."

Dony Maryadi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

tentunya hal itu akan berdampak untuk industri plastik yang akan membuat harga produksinya menjadi meningkat khususnya di PT Hokkan Deltapack Industri (PT. HDI) Riau.

"Ini merupakan permasalahan dari PT HDI sebagai industri pionir dalam industri plastik. Hadirnya cukai plastik akan menjadi beban untuk mereka yang akan membuat harga meningkat, tapi memang pemerintah menentukan cukai plastik juga tidak

semena-mena, jadi kita memang harus tahu alasannya apa," kata Dony usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Jumat (16/12/2022) lalu.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan bahwa penggunaan industri plastik di Indonesia cukup tinggi, sampai hari ini untuk produksi dari bahan baku masih lebih tinggi import daripada barang-barang

produk lokal. Selain harga yang bersaing produsennya pun juga tidak banyak. "Tentunya terkait cukai plastik pada 2023 kita akan bahas dengan Kementerian terkait, insyaallah," kata Dony.

Sebelumnya, dalam pertemuan, Direktur PT HDI Kristina Irijani berharap dengan hadirnya Komisi VII DPR RI tentu bisa memfasilitasi kendala yang selama ini dihadapi, karena PT HDI memakai plastik yang cukup banyak untuk industri makanan dan minuman. "Hadirnya cukai plastik sangat berdampak pada industri kami, karena akan ada tambahan biaya hingga akhirnya di end product menjadi mahal," jelasnya.

Selain kendala cukai plastik, beberapa kendala lainnya yang dihadapi PT HDI, yaitu fasilitas BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) Tahun 2022 dihentikan, adanya bea masuk PP Homopolymer sebesar 5-10% sehingga material impor menjadi lebih mahal, kemudian proses pengajuan masterlist yang sangat lama dan kenaikan UMK 2023 yang cukup signifikan. — mh, cas/mh

Memoderasi Kehidupan Beragama



FOTO:RIA/NIR

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat melakukan kunjungan ke Universitas Hindu Indonesia di Denpasar.

Komisi VIII DPR RI mengunjungi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) di Denpasar, Bali. Kunjungan ke UNHI sangat menarik, karena kampus ini memiliki multidisiplin ilmu. Kehadiran Komisi VIII DPR ke UNHI diharapkan ada moderasi kehidupan beragama di Bali.

“UNHI ini menarik. Menarik karena universitas swasta tetapi memiliki fakultas multi (disiplin ilmu). UNHI tidak hanya pendalaman keyakinan keagamaan tetapi menghadirkan sembilan fakultas yang berorientasi kepada pendidikan umum,” ungkap Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat melakukan kunjungan ke Universitas Hindu Indonesia di Denpasar, Bali, Senin (19/12/2022) silam.

Ia berharap, kehadiran UNHI bisa menjadi pilar untuk melakukan sosialisasi masif terhadap kehidupan moderasi beragama. Disampaikan

Kahfi, salah satu tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah mencerdaskan seluruh komponen anak bangsa dari manapun asalnya, apapun agamanya, dan apapun budayanya.

“Itu adalah sebagian dari perintah konstitusi kita, bahwa pemerintah wajib menghadirkan fasilitas dan layanan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan berbagai macam lembaga pendidikan,” katanya.

Terakhir, dalam kesempatan itu, legislator F-PAN itu menyampaikan sebagai bentuk kepedulian Komisi VIII, pihaknya akan menyerahkan bantuan ke UNHI. “Sebagai bentuk

kepedulian kami dalam menunjang peningkatan pendidikan UNHI, kami menyerahkan bantuan, semoga ini dapat bermanfaat,” tutupnya.

Wakil Rektor III UNHI Denpasar, I Putu Sarjana menjelaskan UNHI adalah salah satu perguruan tinggi keagamaan hindu yang merupakan perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Pendidikan. UNHI berdiri tahun 1963.

Di Palembang, Sumatera Selatan, Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menilai Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) merupakan program alternatif yang tepat, pengganti Program Keluarga Harapan (PKH). John mengaku optimistis program luncuran Kementerian Sosial (Kemensos) ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Kementerian Sosial membuat program PENA, Pahlawan Ekonomi Nasional. Kan, ada kalanya tidak semua penerima PKH itu akan menerima subsidi setiap bulan. Ini



FOTO: WILGA/NR

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis saat pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII di Palembang.

menurut saya adalah suatu program yang sangat bagus yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial dan masyarakat seharusnya merespon itu dengan sebaik-baiknya," jelas John saat ditemui **Parlementaria**, usai melakukan pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (16/12/2022) lalu.

Namun demikian, John mengingatkan pemerintah daerah untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan tepat guna

kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan.

Sementara di Banda Aceh, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka juga menyorot soal anggaran dan kualitas pendidikan. Ia terus memperjuangkan keadilan anggaran dan kualitas pendidikan keagamaan melalui Panitia Kerja (Panitia Kerja) Pendidikan Keagamaan. Sebab, menurutnya, masih ada ketimpangan kesejahteraan, baik secara anggaran, infrastruktur, sarana-prasarana, dan juga tenaga pendidikan keagamaan di pondok pesantren.

"Sudah menjadi bahan diskusi di DPR mengenai bagaimana peningkatan kualitas pendidikan keagamaan supaya lebih diperhatikan. Karena sejauh ini anggarannya dibandingkan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan masih sangat timpang. Jadi, Komisi VIII DPR membuat panja khusus, namanya Panja Pendidikan Keagamaan. Itu salah satu perjuangan kita adalah keadilan anggaran, kualitas pendidikan, dan pengajaran di pendidikan keagamaan," tuturnya, Sabtu (17/12/2022) lampau.

Saat peninjauan tersebut, terungkap bahwa sebagian besar santriwan dan santriwati mengeluhkan masih minimnya sarana prasarana pendidikan seperti laboratorium bahasa, fasilitas kesehatan, faktor penunjang ekstrakurikuler, dan juga alokasi beasiswa yang sangat diharapkan oleh para santriwan dan santriwati tersebut.

"Beasiswa masih lebih sedikit. Belum adanya DAK (Dana Alokasi Khusus) dari APBD bagi pengelolaan pondok pesantren, lalu tenaga pengajarnya yang kurang, data lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang masih belum terserap semua," ungkapny. Diah menilai, jika seluruh permasalahan tersebut terdata secara rinci, dimulai dari sertifikasinya, hingga program *inpassing*-nya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi peningkatan kualitasnya.

"Ini masih jadi PR. Termasuk dalam penganggaran di APBN. Kita tentu berharap ada penguatan penganggaran, entah bagi para siswa, atau bagi lembaga pendidikan, atau pun bagi tenaga pendidiknya dalam APBN kita. Jadi, kita senang sekali kemarin Presiden menyampaikan bahwa pendidikan keagamaan bisa dalam format DAK bantuannya dan kita berharap itu segera terealisasikan," tuturnya.

— rnm, we, ndy/mh



FOTO: NADYA/NR

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI saat meninjau Pondok Pesantren atau Dayah Zuhrotul 'Aziziyah di Banda Aceh.

Menarik Investasi Menyerap Tenaga Kerja



FOTO: MENTARI/NR

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur provinsi Lampung.

Investasi selalu terkait erat dengan penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak investor hadir, semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap. Inilah yang mengemuka saat Komisi IX DPR RI berkunjung ke Lampung.

Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama menyerukan agar pemerintah daerah dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi dalam menarik investor untuk membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Lampung. Hal ini disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jumat (16/12/2022) silam.

Setelah pertemuan dengan Gubernur Lampung, Komisi IX DPR meninjau langsung BLK UPTD Provinsi Lampung. Kepala

BLK menyampaikan bahwa mulai tahun depan BLK UPTD Lampung akan dihibahkan ke Kemenaker menjadi UPTP Lampung. Karenanya, Kemenaker harus memberikan anggaran yang memadai agar segera direhab dan menjadi BLK bertaraf internasional.

Ade juga menekankan, tidak hanya keterampilan kerja, tetapi penting juga untuk fasih berbahasa dalam menjalin komunikasi, seperti Filipina dalam segi keterampilan mereka di bawah Indonesia. Tetapi karena Filipina menguasai bahasa Inggris, jadi mereka lebih terserap

tenaganya di dunia internasional.

Terakhir Ade menekankan Kemenaker segera meningkatkan BLK-BLK di daerah agar mumpuni menciptakan calon tenaga kerja yang terampil juga dapat berkomunikasi dengan baik agar dapat terserap di pasar internasional "Oleh karena itu, kami mendorong Kemenaker serius menyerap tenaga kerja ini dimulai dari hulunya. Hulunya bagaimana wadah yang dibentuk dan menyiapkan calon tenaga kerja agar mempunyai kompetensi yang prima dan dapat berkomunikasi dengan baik," jelas politisi F-Partai Gerindra ini.

Di Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emmanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan, ingin mengetahui perkembangan dan menyerap aspirasi terkait tiga bidang utama yang menjadi fokus pengawasan Komisi IX DPR, yaitu Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan di Provinsi Sultra.

"Komisi IX DPR, hari ini datang untuk melihat bagaimana penyelesaian masalah dalam tiga aspek yaitu kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Isu-isu penting, misalnya bagaimana penanganan stunting di Sultra, capaian kepesertaan JKN-KIS dan BPJS Ketenagakerjaan, dan progres peningkatan keahlian dan pengentasan pengangguran," ungkapnya di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Jumat (16/12/2022) lalu.

Komisi IX DPR berkomitmen terus mendorong pemerintah pusat agar segera menyelesaikan sejumlah isu krusial. Seperti masalah kurangnya tenaga kesehatan, tingginya angka stunting, rendahnya angka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kasus-kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan peningkatan kualitas SDM yang ada di Sultra.

Sementara tim kunker Komisi IX yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Dinas Kesehatan NTB, Jumat (16/12/2022) lalu. Elva Hartati yang memimpin tim ini, menilai, Pemrov NTB kurang memperhatikan fasilitas layanan kesehatan di rumah sakit yang berada



Ketua Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI Elva Hartati saat memimpin pertemuan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“
Perlu ada kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menjadi penunjang fasilitas kesehatan lainnya yang masih belum ada. Maka, perlu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan membuat *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Elva Hartati
Anggota Komisi IX DPR RI

di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Padahal, menurutnya, KEK merupakan tempat pariwisata yang sering dikunjungi wisatawan lokal dan asing.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan bahwa perlu ada kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menjadi penunjang fasilitas kesehatan lainnya yang masih belum ada. Maka, perlu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan membuat *Memorandum of Understanding (MoU)*. Sehingga, proposal yang akan diajukan ke Kementerian Kesehatan akan dibawa di rapat selanjutnya dengan Komisi IX DPR RI. "Kita akan mendorong bersama-sama untuk majunya kesehatan di Indonesia," jelasnya.

Selain itu, Elva juga menjelaskan bahwa RS Mandalika masih berstatus rumah sakit tipe C. Padahal, RS tersebut berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu di kawasan Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika yang menjadi etalase NTB di mata dunia. Hal ini, menurutnya, mesti lebih banyak diperhatikan kembali rumah sakit yang berada di daerah NTB. Sehingga, perhatian pemerintah pusat tidak hanya di NTB saja, melainkan juga di daerah-daerah yang ada di Indonesia khususnya klinik dan Puskesmas yang terletak di luar pulau, bahkan di ujung Indonesia.

mri, rr, upi/mh



Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI saat foto bersama usai pertemuan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara.

DAK Untuk Pengembangan Perpustakaan



FOTO: AYU/NR

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal (kiri) saat foto bersama usai Kunker Reses Tim Komisi X DPR RI ke Provinsi Aceh.

Dana Alokasi Khusus untuk pengembangan perpustakaan di daerah sangat diapresiasi. Seperti disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal yang melihat DAK untuk perpustakaan di Provinsi Aceh menjadi terobosan yang baik.

Iliza Sa'aduddin Djamal mendukung pengembangan perpustakaan di Provinsi Aceh melalui pembiayaan DAK. Perpustakaan Nasional telah memberikan DAK untuk Provinsi Aceh sebesar Rp36,9 miliar pada tahun 2023 ini. "Sebagai Anggota DPR RI dari Aceh, saya tentu gembira dan mengapresiasi. Karena dukungan dari Komisi X DPR RI, Provinsi Aceh mendapat DAK sebesar Rp36,9 miliar untuk tahun 2023. Angka ini meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya yang hanya Rp21,1 miliar pada 2022," ujar Illiza Jumat (16/12/2022) silam.

Dijelaskannya, DAK Perpustakaan yang diterima Aceh itu merupakan terbesar nomor tiga nasional, setelah NTT (Rp54,6 miliar) dan Sumatera Barat (Rp42,9 miliar). Meski demikian, ia juga berharap komitmen dan keseriusan para pejabat dan pemangku kepentingan di Provinsi Aceh, supaya bantuan yang diberikan pemerintah pusat tersebut dapat

menghasilkan nilai strategis bagi Aceh, khususnya layanan dan fasilitas perpustakaan Aceh.

"Terus terang saya malu, setiap DPR RI datang ke Aceh, pejabat dan pemangku kepentingan tertinggi di Aceh tidak hadir dalam pertemuan. Seolah-olah pertemuan ini tidak penting, dan tidak ada keseriusan dari pemerintah Aceh untuk meminta dukungan dari pusat yang bisa memberikan nilai strategis dan lebih memperbaiki kehidupan di Aceh. Padahal, Aceh berharap sekali dukungan DPR RI untuk mendorong peningkatan anggaran Aceh," tegas politisi Fraksi PPP ini.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Kepala Pusdatin Perpunas, Taufiq A Gani mengungkapkan bahwa pihaknya akan membangun tiga gedung perpustakaan di Aceh,

yakni di Simeulue, Aceh Tengah dan Sabang, dengan nilai masing masing Rp10 miliar. Tidak hanya itu, ia juga akan memperluas gedung perpustakaan Subulussalam, penyediaan perabot untuk Subulussalam, Banda Aceh dan Sabang, sarana TIK untuk Simeulue, Subulussalam dan Banda Aceh, bahan koleksi untuk Simeulue, Aceh Tengah, Banda Aceh dan Sabang.

Masih di Aceh, Anggota Komisi X DPR Sodik Mudjahid mendorong realisasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk percepatan penyelesaian guru honorer. Pansus yang bersifat gabungan lintas komisi tersebut diperlukan untuk memberikan solusi bagi persoalan yang terkesan telah berlarut-larut itu.

"Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Bappenas, Menteri Keuangan, dan beberapa kementerian yang banyak tenaga honorernya seperti Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Pertanian pada tahun 2023 harus duduk bersama, sehingga persoalan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) cepat selesai, ulas Sodik, Jumat (16/12/2022) lalu.

Sodik menilai masalah guru



FOTO: OJI/NR

Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid saat mengikuti Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Aceh.

honoror selalu menjadi hambatan karena pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya terbatas karena terdampak pandemi Covid-19. Sebagaimana diberitakan, Kemenpan-RB meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia menghapus tenaga honorer pada November 2023. Kebijakan ini untuk menata sistem kepegawaian.

Bagi daerah yang membutuhkan tenaga tambahan bisa menggunakan tenaga kerja dengan status *outsourcing*. Sodik juga menyoroti beberapa masukan dari

para guru di Aceh baik yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai honorer yang sedang proses menjadi PPPK.

"Di SMPN 6 Aceh, tadi saya mendengar keluhan guru negeri. Ia awalnya adalah guru swasta yang diangkat menjadi pegawai negeri dan harus melepaskan sekolah lamanya. Ini adalah masalah lama dan kita sudah mendengar sebelumnya. Kunjungan kali ini membuktikan bahwa hal semacam ini benar terjadi di lapangan," tukas legislator Dapil Jawa Barat I ini.

Di sisi lain, Sodik menilai beberapa siswa yang ditemuinya saat interaksi di SMPN 6 Banda Aceh merasa nyaman dengan program Merdeka Belajar, kegiatan ekstrakurikuler juga dikembangkan. "Program Merdeka Belajar ini juga harus dijabarkan lagi petunjuk pelaksanaannya, termasuk tentang kompetensi dasar gurunya dan ketersediaan waktu," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 6 Banda Aceh, Syarifah Nargis pada kesempatan tersebut menyampaikan sarana dan prasarana pendidikan yang memerlukan perbaikan mengikuti kebutuhan dan perkembangan. Juga mengenai beasiswa yang dikeluhkan masih belum cukup. — ayu, oji/mh



FOTO: OJI/NR

Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid dalam saat mengikuti Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Aceh.

Kesejahteraan Masyarakat Tidak Diukur Dari Pertumbuhan Ekonomi

Interpretasi pertumbuhan ekonomi tidak selalu menuju angka kesejahteraan masyarakatnya. Bila pertumbuhan jadi ukuran, dikhawatirkan hanya akan memperlebar kesenjangan ekonomi. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir di Ambon, Provinsi Maluku.

Ya menyayangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 6,01 persen, namun tidak sejalan dengan semakin tingginya persentase tingkat kemiskinan sebesar 15,97 persen. "Pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan keutuhan. Kita minta kepada otoritas lokal di sini mencari tahu penyebabnya apa. Jangan sampai semua pertumbuhan ekonomi itu kita anggap gambaran terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat, malah menimbulkan bias. Ini, nih, yang harus kita hilangkan," ucap Hafisz, Senin (19/12/2022) lampau.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu meminta Pemerintah Pusat melalui Lembaga *National Single Window* (LSNW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk



FOTO: SAUM/NR

“

Pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan keutuhan. Kita minta kepada otoritas lokal di sini mencari tahu penyebabnya apa. Jangan sampai semua pertumbuhan ekonomi itu kita anggap gambaran terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat, malah menimbulkan bias. Ini, nih, yang harus kita hilangkan.

Achmad Hafisz Tohir
Anggota Komisi XI DPR RI

mempertimbangkan kebijakan dalam mengalokasikan dana perimbangan. Seharusnya, jelas Hafisz, dana perimbangan tidak hanya dilihat dari variabel pertumbuhan ekonomi saja.

"Untuk memperbaiki ini, memang memerlukan *effort* yang sangat besar. Maka dari itu, saya mengimbau

kepada Menteri Keuangan untuk memberikan dana perimbangan pusat ke daerah itu harus juga dilihat kebutuhan-kebutuhan mendasar apa yang harus kita berikan. Jangan hanya berdasarkan, 'oh kamu harus 1 persen', jangan kita pakai ukuran-ukuran seperti itu lagi," tandas Wakil



FOTO: SHANE/ANR

Kami juga mempertanyakan kepada mitra kami, bahkan kepada Kementerian Keuangan yang juga turut hadir di sini terkait serapan anggaran Papua Barat ini. Karena Papua Barat serapan anggarannya kurang lebih baru sekitar 55 persen, berarti ini terendah secara keseluruhan di Indonesia itu per triwulan ketiga.

Heri Gunawan
Anggota Komisi XI DPR RI

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu.

Sementara di Sorong Papua Barat, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta Pemerintah Daerah Papua Barat dan Barat Daya untuk memperbaiki alokasi dan mempercepat realisasi anggaran. Sebab, menurutnya, serapan anggaran yang rendah ini tengah menjadi sorotan Presiden Jokowi di bidang ekonomi. Hal ini disampaikan pria yang kerap disapa Hergun itu saat menghadiri pertemuan dalam

Kunjungan Kerja Reses Komisi XI Senin (19/12/2022) lampau.

"Kami juga mempertanyakan kepada mitra kami, bahkan kepada Kementerian Keuangan yang juga turut hadir di sini terkait serapan anggaran Papua Barat ini. Karena Papua Barat serapan anggarannya kurang lebih baru sekitar 55 persen, berarti ini terendah secara keseluruhan di Indonesia itu per triwulan ketiga. Namun, harapan kami dengan adanya Natal dan Tahun Baru 2023 di Papua Barat ini

Komisi XI DPR RI juga mengimbau agar realisasi anggaran bisa dialokasikan dengan sebaik mungkin, agar bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua Barat.

bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi," ungkap Hergun.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Himbara, Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia), Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia), dan melibatkan Pemerintah Daerah Papua Barat dan Barat Daya ini, Komisi XI DPR RI juga mengimbau agar realisasi anggaran bisa dialokasikan dengan sebaik mungkin, agar bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua Barat.

"Karena setiap hari, setiap waktu, setiap siklus anggaran itu rata-rata penyerapan adanya di ujung dari akhir masa anggaran. Tentunya ini juga kalau diaplikasikan atau digunakan untuk pembangunan program infrastruktur ini agak kurang baik hasilnya," ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Diketahui bahwa hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi di Papua Barat masih rendah dibanding daerah lainnya. "Kita ketahui Papua Barat pertumbuhan ekonominya baru 3,7 persen, di mana pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang relatif jauh tertinggal secara nasional yang ada di angka lima sampai enam persen atau empat sampai lima persen," ungkap Hergun.

ts/syrr/mh

Audit Total PT GNI

Serentetan peristiwa yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi sorotan parlemen. Sebanyak empat orang pekerja tewas dalam satu bulan terakhir. Kebakaran hingga bentrok menjadi penyebab tewasnya pekerja.

W

akil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat

(Korkesra) Muhaimin Iskandar meminta pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap PT GNI, baik dari sisi teknologi smelter hingga pelaksanaan aspek kesehatan dan keselamatan kerja.

"Audit ini penting untuk mengungkap terjadinya bentrokan sekaligus mencegah kasus serupa di perusahaan yang lain," ujar Muhaimin. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mengungkap fakta penyebab bentrokan yang terjadi antarkelompok pekerja di PT GNI Sabtu (14/1) lalu, hingga menewaskan dua pekerja.

Cak Imin menyesalkan terjadinya bentrokan itu. Dia mengingatkan semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi dengan berbagai spekulasi yang beredar mengenai bentrok tersebut agar proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian berjalan secara optimal.



“

Semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi dengan berbagai spekulasi yang beredar mengenai bentrok tersebut agar proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian berjalan secara optimal.

Muhaimin Iskandar

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra)

Bentuk Pansus PT GNI

Komisi VII DPR RI akan segera mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PT GNI Morowali Utara, atas berbagai permasalahan yang belakangan terjadi di perusahaan smelter nikel tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mengatakan, pembentukan Pansus dilakukan untuk mendalami berbagai kejadian yang terjadi,

seperti kecelakaan kerja dan insiden bentrokan antara pekerja lokal dan WNA harus diselidiki akar penyebabnya dari berbagai sisi.

"Dari sisi teknis, perlu dilakukan audit teknis. Apakah pabrik tersebut selama ini menggunakan komponen peralatan yang berkualitas rendah dan tak sesuai ketentuan. Sehingga, rawan terjadi kecelakaan kerja serta membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar," ujar Gunhar

Gunhar juga menyoroti terjadinya bentrokan antara pekerja lokal dengan pekerja asing baru-baru ini, yang disebut-sebut berawal dari ketidakadilan terhadap pekerja lokal. Permasalahan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan, menurutnya, harus dievaluasi agar perusahaan bisa beroperasi secara harmonis.

"Isu yang berkembang, bentrokan antara pekerja lokal dengan pekerja asing, akibat adanya ketidakadilan yang dialami pekerja lokal, seperti sistem pengupahan dan fasilitas. Untuk itulah, Komisi VII perlu melakukan evaluasi dan menyelesaikan

“

Isu yang berkembang, bentrokan antara pekerja lokal dengan pekerja asing, akibat adanya ketidakadilan yang dialami pekerja lokal, seperti sistem pengupahan dan fasilitas.

Yulian Gunhar
Anggota Komisi VII DPR RI.



FOTO: OJ/NR

“

Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya.

Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR RI.



FOTO: OJ/NR

permasalahan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha yang dianggap tidak harmonis itu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah mengevaluasi izin operasional PT GNI yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Desember 2021 lalu. Bahkan, PT GNI masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang hilirisasi mineral dan batu bara (minerba).

Belum setahun diresmikan, peristiwa yang memakan korban jiwa terjadi di PT GNI. Pada Kamis 22 Desember 2022, dua orang karyawan tewas setelah terjebak kebakaran di pabrik smelter 2 PT GNI. Kemudian pada 14 Januari 2022 terjadi bentrok

antarkaryawan yang akhirnya kembali merenggut dua nyawa.

Mulyanto menyebutkan, pemerintah jangan menganggap remeh bentrok yang menewaskan dua orang karyawan tersebut. Dia menilai bisa jadi hal tersebut dipicu oleh masalah yang lebih mendasar, bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja. Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai.

"Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya," kata Mulyanto. Oleh karena itu, ia

mendesak pemerintah mencabut izin operasi smelter PT GNI, kemudian dilakukan audit teknologi, bukan hanya terkait soal K3.

"Yang juga kita khawatirkan adalah pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang, komponen peralatan yang berkualitas rendah, serta manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat," ujarnya.

Bila ini terbukti, lanjut Mulyanto, maka pihak manajemen PT GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan, karenanya pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi meninjau langsung lokasi insiden kebakaran di pabrik pengelolaan dan pemurnian (smelter) pada awal Januari lalu.

Bambang meminta PT GNI bertanggung jawab terhadap korban, serta mendorong kementerian teknis terkait untuk melakukan audit terhadap smelter tersebut. "Komisi VII juga akan segera memanggil semua pihak terkait untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh kejadian ini dan mengantisipasi agar tidak terjadi di smelter lainnya," kata Bambang. — ann/mh

Dua Usulan Resolusi di APPF Bangkok

Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Kim Jin-pyo datang berkunjung ke Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan Ketua Parlemen Korsel itu beserta delegasinya, pertengahan Januari lalu. Ini momentum peningkatan hubungan kedua negara.

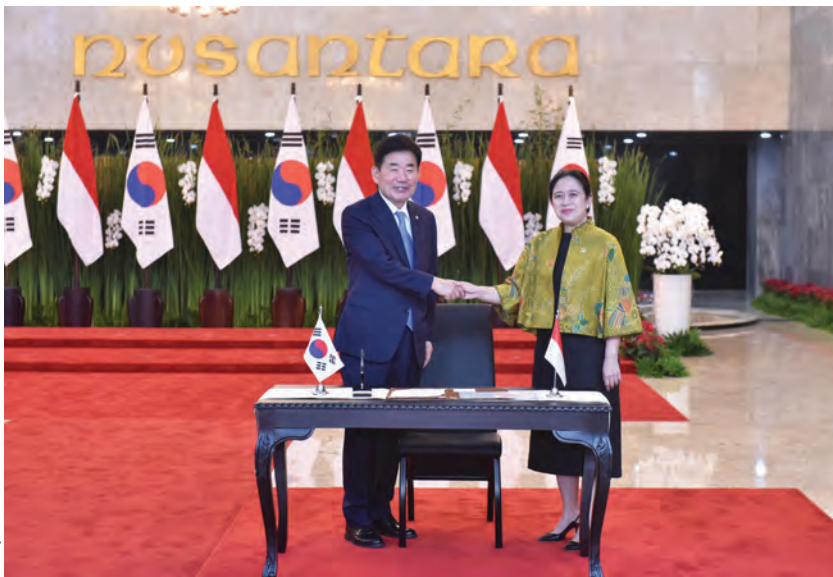
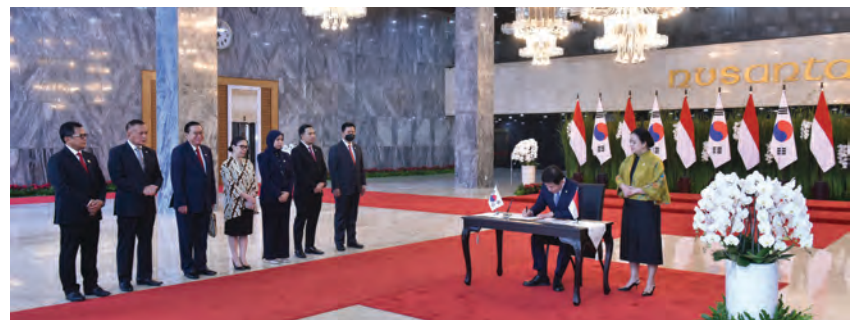


FOTO: JAKA/NR

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menerima Kunjungan Ketua Majelis Nasional (Parlemen) Republik Korea Kim Jin-Pyo ke DPR RI, Senayan, Jakarta.

Puan berharap, kunjungan resmi delegasi Parlemen Korea Selatan ke DPR RI dapat semakin memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia-Korea Selatan, khususnya antarparlemen. Baginya, momen ini menjadi spesial lantaran hubungan diplomatik ini telah memasuki usia 50 tahun, terhitung sejak tahun 1973.

"Peringatan 50 tahun hubungan diplomatik ini harus menjadi momentum bagi peningkatan hubungan Indonesia-Korea di masa depan. Dalam peringatan ini, kita dapat melakukan serangkaian



kegiatan di Indonesia dan Korea yang melibatkan berbagai elemen masyarakat," tutur Puan kepada Parlemenaria.

Perlu diketahui, peringatan 50 tahun hubungan Indonesia- Korea Selatan perlu dimaknai dengan kerja sama

konkret sekaligus bermanfaat bagi rakyat kedua negara. Mengingat, kata Puan, per awal tahun ini perjanjian ekonomi Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2023.

Ia pun menilai, kerja sama antardua negara perlu meningkatkan intensitas hubungan sekaligus dialog termasuk soal politik luar negeri antara Indonesia dan Korea. Hal ini turut jadi perhatian karena perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang kini terjadi. Sehingga, baik Indonesia dan Korea Selatan dinilai perlu memperdalam dan memperluas jangkauan hubungan seperti sektor ekonomi, infrastruktur, perdagangan, dan investasi.

Selama pertemuan tersebut, perempuan pertama yang terpilih menjadi Ketua DPR RI ini juga menilai bahwa Indonesia dan Korea Selatan perlu mengkaji hubungan melalui kesepakatan yang dilaksanakan selama ini. Dari hasil kajian tersebut, diharapkan menjadi landasan perencanaan pengembangan hubungan masa mendatang berdasarkan dinamika global dan regional.

"Indonesia dan Korea Selatan perlu pengembangan hubungan

berkarakter abad-21 (*21st century relations*) yang berkontribusi pada perdamaian, kesejahteraan, dan mengatasi perubahan iklim di tingkat global dan regional," imbuhan Mantan Menko PMK ini. — hal/mh

Indonesia-Vietnam Perkuat Bilateral Parlemen

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Presiden Republik Sosialis Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Kenangan sejarah masa lalu, disampaikan Puan di gedung DPR. Nostalgia CONEFO (Conference of New Emerging Forces) yang digagas Presiden Soekarno pun mengemuka.



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menerima kunjungan Presiden Republik Sosialis Vietnam Nguyen Xuan Phuc, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Gedung Kura-Kura DPR, dulu dibangun untuk penyelenggaraan CONEFO sebagai kekuatan baru negara-negara berkembang yang menentang negara-negara besar (old-established forces) ketika itu. "Vietnam Utara saat itu merupakan bagian dari CONEFO. Maka, kunjungan di gedung DPR ini saya harapkan dapat menjadi pendorong untuk mempererat kerja sama bilateral Indonesia dan Vietnam, termasuk kerja sama antarpemerintah," ucap Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Puan menambahkan, hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam yang terjalin sejak tahun 1955 terus berkembang pesat. Hubungan baik Indonesia-Vietnam disebut telah berkembang sejak awal kemerdekaan. Ini terlihat dari kedekatan hubungan antara bapak bangsa kedua negara, yakni Presiden pertama RI Sukarno dengan Presiden Vietnam saat itu, Ho Chi Minh.

"Keduanya memiliki hubungan persahabatan, memiliki kesamaan visi dan ideologi, dan pandangan tentang nasionalisme, anti imperialisme, dan menekankan pada perjuangan masyarakat kecil. Masing-masing



berhasil menentang penjajahan di Indonesia dan Vietnam," tutur Puan.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya kerja sama multilateral mengingat dunia saat ini tengah mengalami krisis mode sejak pandemi Covid-19 melanda tahun 2020. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Puan

mendorong peningkatan kerja sama internasional, termasuk kerja sama bilateral antarnegara termasuk Indonesia-Vietnam.

"Kedua negara dapat memperkuat kerja sama bilateral untuk berkontribusi bagi upaya mengatasi tantangan stabilitas dunia dan pertumbuhan ekonomi global," urainya. Tak hanya itu, kerja sama parlemen Indonesia-Vietnam juga diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Menurut Puan, kerja sama antarpemerintah dapat memberi nilai tambah bagi kemitraan strategis kedua negara, khususnya dalam mempromosikan nilai demokrasi dan governance di kawasan.

Pertemuan Puan dengan Presiden Nguyen Xuan Phuc juga turut membahas penguatan kerja sama Ekonomi perdagangan Indonesia-Vietnam di samping hubungan perdagangan dan transportasi, kerja sama dalam sektor pariwisata. Kepada Puan, Presiden Vietnam

menyampaikan berbagai harapannya dalam upaya mempererat hubungan kedua negara.

"Beliau menyatakan bagaimana agar kita sama-sama menjaga kawasan yang ada di ASEAN untuk selalu bisa damai, sejahtera, dan tidak terganggu dengan apapun," tutup Puan. — hal/mh



DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)



Dony Maryadi Oekon

Temui Petani Kopi

Pada Desember 2022 lalu, Anggota DPR RI Dony Maryadi Oekon rajin menemui para petani kopi. Uniknya, para petani kopi yang ditemuinya adalah mantan narapidana teroris. Mereka adalah binaan Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di Kiraha Bodas, Tasikmalaya.

Para mantan teroris itu mengikuti program integrasi sosial, lewat bimbingan menjadi petani kopi. Status mantan teroris ini masih sebagai klien pemasyarakatan, karena bebas melalui mekanisme integrasi seperti pembebasan bersyarat.

Karena sifatnya bersyarat, klien pemasyarakatan yang bebas melalui program pembebasan bersyarat masih harus mengikuti pola pembimbingan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Dikatakan legislator dapil Jabar XI (Garut dan Tasikmalaya) ini,

program pembekalan ini ditujukan agar para mantan teroris tersebut memiliki kemampuan mengelola produk pertanian. Sebelumnya, para mantan teroris ini juga telah mengikuti pembinaan kemandirian di Lapas. Hanya mereka yang sudah berikrar setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) saja yang bisa ikut program lanjutan ini.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini berharap, para mantan teroris itu bisa mempercepat proses integrasi sosial. Sehingga, mereka bisa diterima kembali di masyarakat dan tentu harus setia pada NKRI. Selain itu, Dony juga bertemu dengan kader dan

relawan PDI Perjuangan dalam acara lomba dan gebyar Pangan Lokal.

Gebyar dan Lomba Inovasi Menu Berbasis Pangan Lokal tingkat kota/kabupaten yang kemudian pemenang akan maju di tingkat Provinsi Jawa Barat. Lomba ini merupakan langkah konkrit hasil eksplorasi tanaman pangan lokal Jawa Barat yang akan memperkaya khasanah kuliner berbasis kearifan lokal. Terlebih lagi PDI Perjuangan juga memiliki kebijakan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, guna mengurangi ketergantungan pada beras dan gandum.

Diversifikasi pangan itu melalui gerakan budi daya sagu, jagung, pisang, sorghum, porang, talas, sukun, ketela, ubi jalar, dan berbagai ragam pangan yang ada di wilayah Jawa Barat. Dony berharap, para peserta mampu memanfaatkan berbagai tanaman lokal di Jawa Barat untuk diolah menjadi makanan alternatif pengganti beras.

— ayu/mh



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Dony Maryadi Oekon saat menemui para petani kopi yang mana adalah mantan narapidana teroris di Kiraha Bodas, Tasikmalaya.

Maman Abdurrahman

Dukung Pemerataan Akses Listrik di Daerah 3T

Energi telah menjadi kebutuhan pokok andalan rakyat Indonesia. Tanpa pemerataan akses energi, kesenjangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat akan semakin melebar. Menyadari betul peran vital energi, terutama energi listrik, Anggota Fraksi Golongan Karya (F-Golkar) DPR RI Maman Abdurrahman meresmikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) rumah tangga sebanyak 5.487 rumah tangga di Provinsi Kalimantan Barat.

Bantuan tersebut khusus disalurkan kepada masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T) dan layak memperoleh bantuan berdasarkan validasi kepada desa/lurah atau pejabat setingkat. BPBL ini merupakan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang memiliki tujuan pemerataan akses listrik hingga ke desa dan dusun, khususnya di daerah 3T.

Maman, sebagai legislator Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I DPR RI



Anggota DPR RI Maman Abdurrahman saat meresmikan Program BPBL rumah tangga di Desa Limbung Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

itu, menyampaikan apresiasi kepada KESDM yang mendukung kemajuan di Kalimantan Barat. Ia menyadari bantuan tersebut berdampak besar bagi seluruh aktivitas masyarakat Kalimantan Barat.

"Berkat support dan semangat dari pemerintah PT PLN (Persero) dan segenap seluruh kepala desa di setiap daerah dan tim di lapangan yang sudah bekerja di lapangan dapat mendorong kemajuan di Kalimantan Barat," ujar Maman dalam peresmian Program BPBL di Desa Limbung Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menanggapinya, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana mengatakan program BPBL ini adalah terobosan besar. Dirinya pun turut mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI, yang juga terjun langsung melihat masalah hingga ke lapangan. "Selain Program BPBL, Kementerian ESDM juga mempercepat penyediaan

listrik di wilayah yang belum ada aliran listriknya." ujar Dadan.

Sebagai informasi, hingga semester-II 2022, rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga listrik dengan total rumah tangga Indonesia mencapai 99,96 persen. Dari data tersebut, sebut Dadan, masih ada sekitar 357.141 rumah tangga yang belum berlistrik dan sebagian besar tersebar di dalam 3T.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan turut mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VII DPR RI dan KESDM. Baginya, apresiasi ini adalah bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat yang diupayakan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dirinya pun menegaskan pihaknya siap menyiapkan dan mengawal data yang dibutuhkan untuk mempercepat penyambungan listrik di daerahnya. — ts/mh

Budisatrio Djiwandono

Bantu 1.000 Bibit Pohon dan P2L Di Balikpapan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono dari Fraksi Partai Gerindra menyerahkan 1.000 bibit pohon kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Hortik Jaya sekaligus bantuan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk Kelompok Wanita Tani Kencana.

Penyerahan bibit ini dilakukan di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, beberapa waktu

lalu. Ia memang sering membantu para petani setempat.

Sebelumnya Budisatrio pernah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian. Diharapkan dengan bantuan ini produksi pertanian dan

ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Di sela-sela reses, Budisatrio juga menerima aspirasi masyarakat terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Sebab, kelangkaan pupuk bersubsidi hampir terjadi di semua kecamatan.

Sementara itu, harga pupuk non subsidi cukup mahal. Kepada Budisatrio, para petani menyampaikan harapannya agar mereka bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga murah. — ann/mh



FOTO: IST/NR

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono saat foto bersama usai menyerahkan bibit pohon kepada Gapoktan Hortik Jaya sekaligus bantuan Kegiatan P2L untuk Kelompok Wanita Tani Kencana.

Zuristyo Firmadata

Serahkan Empat Unit Ambulans

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata berkerja sama dengan PT Timah (Persero) menyerahkan bantuan berupa empat unit ambulans senilai Rp1,2 miliar. Bantuan tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Bangka Belitung.

Tiga dari empat unit ambulans sudah diberikan masing-masing kepada Yayasan At Taqwa Gambir, Kabupaten Bangka, Yayasan Baitul Khairah Jada Bahrin, Kabupaten Bangka, Pemerintah Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan satu unit ambulans diberikan kepada Lazismu, Belitung Timur.

"Kami sadar betul bahwa untuk meningkatkan produktivitas manusia, penunjang utamanya adalah kesehatan. Semoga dengan adanya ambulans ini, dapat mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bangka Belitung," ungkap Zuristyo baru-baru ini.

Anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan, saat ini ada upaya untuk terus meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Bangka Belitung Kepulauan. "Hidup

sehat itu merupakan kewajiban bagi kita semua untuk bisa meningkatkan kualitas SDM. SDM membaik, produktivitas pun meningkat," tegas legislator NasDem dari Dapil Bangka Belitung itu.

Bang Tyo, sapaan Zuristyo juga menyampaikan terima kasih kepada PT Timah yang hingga saat ini konsisten memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat Bangka Belitung.

"Semoga program kemitraan bersama PT Timah ini dan BUMN lainnya bisa ditingkatkan terus untuk kepentingan rakyat Indonesia khususnya masyarakat Bangka Belitung sesuai tujuan berdirinya BUMN, karena untuk membangun daerah dibutuhkan sinergitas semua elemen," pungkas Zuristyo. **rmm/mh**



FOTO: IST/ANR

Anggota DPR RI Zuristyo Firmadata saat menyerahkan bantuan empat unit ambulans bekerja sama dengan PT Timah (Persero) di Provinsi Bangka Belitung.

Tommy Kurniawan

Sosialisasikan Peran BUMN Untuk Pembangunan IKN



Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Tommy Kurniawan saat melakukan sosialisasi di Dapil-nya Jawa Barat IV soal peran penting BUMN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Tommy Kurniawan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya di daerah pemilihannya (Dapil) Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten Bogor, soal peran penting BUMN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tomkur, sapaannya, melakukan sosialisasi di Amanuba Hotel dan Resort Rancamaya Bogor yang dihadiri ratusan warga pada 15 Januari 2023 lalu. Kegiatan tersebut dilakukan, agar BUMN memberikan kontribusi terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Timur. PT Waskita Karya disebutkan sangat luar biasa dalam memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

"Kita tahu semua pemerintah sedang membangun infrastruktur IKN. Peran besar dan sangat luar biasa Waskita Karya yang berhasil meraih beberapa kontrak proyek baru di IKN seperti gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukung pada kawasan istana kepresidenan dengan total nilai Rp1,35 triliun" ungkap Tommy dalam keterangan yang diterima Parleментарaria.

Lebih lanjut Tommy menjelaskan, gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukung pada kawasan

istana kepresidenan IKN rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 50.678 m2 dan luas bangunan 33.312 m2 yang terbagi menjadi 3 bangunan yaitu sekretariat presiden, mess Paspampres, dan bangunan pendukung. Pembangunan ini membutuhkan waktu selama 720 hari kalender dengan target penyelesaian pekerjaan pada akhir 2024.

"Selain itu Waskita juga berhasil memenangkan 2 tender proyek jalan yaitu Proyek Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp990 miliar dan pembangunan jalan kerja/logistik IKN (KIPP) Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp182 miliar," jelas politisi yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI.

— hal/mh

Ongku Parmonangan Hasibuan Giat Serap Aspirasi Masyarakat Tapanuli Selatan



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Ongku Parmonangan Hasibuan saat serap aspirasi dalam rangka Reses ke Dapil Sumut II di Ponpes Syekh Ahmad Basyir Tapsel.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Ongku Parmonangan Hasibuan melaksanakan Reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut II di Ponpes Syekh Ahmad Basyir Tapanuli Selatan (Tapsel). Dalam rangka Silaturahmi dan serap aspirasi masyarakat di Dapil Sumut II, Ongku yang merupakan mantan Bupati Tapsel juga disambut hangat masyarakat.

"Satu bulan pasca saya dilantik sebagai Pengganti Antar-Waktu (PAW) Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Dapil Sumut II, saya telah berkunjung ke beberapa daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat, sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi serta kewajiban sebagai wakil rakyat, yaitu turun ke

daerah menjangkau aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya di pusat," katanya, Desember 2022 lalu.

Lanjut Ongku menjelaskan, Komisi II merupakan Mitra Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mengutarakan program

P3K Guru Honorer dan tentang program PTSL. Terkait hal itu, Ongku Parmonangan menjelaskan kepada masyarakat akan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Saya sebagai wakil rakyat harus sesuai tugas dan fungsinya. Saya ingatkan untuk ke depan agar masyarakat benar-benar menggunakan hak pilih secara benar dan cerdas, agar wakil rakyat sesuai tugas dan fungsinya," harapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Ongku juga menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat yang ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersama mitra kerja Kantor Pertanahan.

— tn/mh

Kurniasih Mufidayati

Memberi Perhatian Pada Kelompok Rentan Dalam Bencana



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati saat mengunjungi korban kebakaran di wilayah Pela Mampang, Jakarta Selatan.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati pada masa reses mengunjungi korban kebakaran di wilayah Pela Mampang, Jakarta Selatan awal Januari 2023 lalu. Kebakaran di wilayah tersebut telah membuat 83 rumah hangus, 140 orang termasuk anak-anak dan lansia harus mengungsi.

Anggota Dewan dari Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri ini, menyalurkan bantuan makanan tambahan bergizi berupa kacang hijau dan makanan bergizi lainnya untuk anak-anak yang mayoritas mengungsi di Masjid Al Aqwan.

"Saya ditemani Ketua BPKK DPD PKS Jaksel dan Ketua BPKK DPC PKS Mampang. Misi kami memperhatikan

gizi khususnya pada anak-anak yang ikut mengungsi akibat kebakaran Mampang. Kacang hijau diberikan karena kita peduli gizi anak di tempat pengungsian. Semua kebutuhan gizi anak-anak dan ibu-ibu harus tetap terjaga," ujar Kurniasih.

Kurniasih berharap pemerintah bisa memenuhi kebutuhan gizi dan memperhatikan kesehatan korban, khususnya anak-anak dan kaum ibu. Sebab, dalam UU Bencana, kelompok yang masuk dalam kategori rentan

dan harus mendapat perhatian lebih adalah anak-anak, ibu hamil, lansia, dan disabilitas.

"Pemberian makanan tambahan bergizi ini semoga membantu anak-anak untuk tetap mendapatkan asupan gizi. Tinggal bersama di daerah pengungsian tentu tidak seideal tinggal di rumah, sehingga kesehatan mereka harus tetap dipantau dan dijaga daya tahannya," papar Kurniasih.

Dia pun berharap para korban bisa segera bangkit seperti sedia kala, dan turut mendoakan agar tragedi segera berlalu. "Semoga segera bisa kembali menempati hunian dengan perbaikan dan bantuan yang diberikan. Inshaallah saling menguatkan dan para korban bisa mendapat perhatian, bantuan, dan dukungan yang memadai," ujar Kurniasih. — **ssb/mh**

HA Bakri

Dukung Pemindahan Bongkar Muat Batubara

Anggota DPR RI HA Bakri menyatakan dirinya mendorong pemerintah pusat untuk memindahkan aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Talang Duku ke Pelabuhan Ujung Jabung. Hal ini mengacu pada posisi pelabuhan yang berada di tengah kota, sehingga menyebabkan kerusakan jalan dan kemacetan.



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI HA Bakri, mendorong pemindahan aktifitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Talang Duku ke Pelabuhan Ujung Jabung.

“**T**empat bongkar (batubara) itu di Talang Duku. Sekarang kita lihat situasi dan kondisi saat ini, saya kira ke depan sudah tidak layak lagi dipertahankan. Talang Duku letaknya di pusat kota. Kalau kendaraan batubara itu ribuan, kalau mau ke sini pasti lewat kota. Ini mengakibatkan macet,” ungkap Bakri usai meninjau Pelabuhan Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Kamis (19/1/2023) lalu.

Legislator dapil Jambi itu pun mendesak pemerintah pusat memindahkan kegiatan bongkar batubara di Pelabuhan Talang Duku ke Pelabuhan Ujung Jabung. “Saya kira, ke depan pemerintah harus berani (memindahkan pelabuhan), karena di ujung terowongan tanahnya milik pemerintah dan sudah dibangun

“

Saya kira, ke depan pemerintah harus berani (memindahkan pelabuhan), karena di ujung terowongan tanahnya milik pemerintah dan sudah dibangun beberapa bangunan.

beberapa bangunan. Kita lihat Pemprov juga sudah melakukan pembebasan lahan. Sampai saat ini mereka masih membuka lahan untuk jalan menuju pelabuhan corntip,” tuturnya.

Menurut data yang dirilis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, per 2 Januari 2023 terdapat 8.600 unit angkutan batu bara yang beroperasi di Pelabuhan Talang Duku. Hal inilah yang menyebabkan kemacetan dan kerusakan jalan di beberapa ruas jalan nasional di Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi pun telah mendapatkan bantuan untuk pembangunan Jembatan Sungai Rambut yang akan dibangun pemerintah pusat pada 2023 dan diharapkan selesai pada 2024. Jembatan ini menjadi harapan untuk keberlanjutan penyelesaian pembangunan proyek di Pelabuhan Ujung Jabung. — gal/mh

Muslich Zainal Abidin

Serahkan Bantuan di Kabupaten Temanggung

Anggota Komisi VIII Muslich Zainal Abidin menyerahkan secara simbolis dana bantuan 3 program, yaitu BLT BBM, Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH) di 20 kecamatan se-Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, beberapa waktu yang lalu.



FOTO: IST/NIR

Anggota Komisi VIII Muslich Zainal Abidin saat menyerahkan secara simbolis dana bantuan 3 program di 20 kecamatan se-Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Bertempat di Kantor PT. Pos Indonesia cabang Temanggung dan Balai Kelurahan Jurang, Kecamatan Temanggung, Muslich menyerahkan dana bantuan yang diperuntukkan bagi 83.513 KPM di seluruh Kabupaten Temanggung yang bersumber dari DTKS (Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kemensos RI, dengan jumlah total Rp102.748.950.000.

Dalam penyerahan bantuan ini, legislator F-PPP itu didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Prasodjo beserta jajarannya, Kepala PT. Pos Indonesia cabang Temanggung Arif Maulana, perwakilan Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Lurah Jurang, dan pilar-pilar sosial di bawah Dinsos Kabupaten Temanggung.

Di sela-sela penyaluran BLT 3 program Muslich mengungkapkan kepada penerima BLT agar bantuan

itu dipergunakan dan dikelola dengan baik. "Mohon dana bantuan ini jangan dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu bermanfaat. Dipergunakan yang sebaik-baiknya, syukur buat usaha, misal untuk membeli bebek," tuturnya.

“

Mohon dana bantuan ini jangan dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu bermanfaat.

Kepala Dinsos Prasodjo menyampaikan, BLT 3 program di bulan November diberikan tunai secara bersamaan lewat PT. Pos Indonesia cabang Temanggung.

"Rinciannya untuk BLT BBM selama dua bulan, masing-masing per KPM Rp150 ribu. Jadi, mendapatkan Rp300 ribu, BPNT/sembako diberikan Oktober, Nopember, Desember masing-masing per KPM Rp200 ribu. Jadi, mendapatkan Rp600 ribu, dan bantuan PKH tergantung komponen masing-masing. Misalnya, anak balita, ibu hamil/menyusui, dan lansia, diberikan di seluruh Indonesia melalui PT. Pos Indonesia," katanya.

Diserahkan juga bantuan kepada pemerlu kesejahteraan sosial yang berada di bawah binaan Sentra Terpadu Kartini Temanggung dan Dinsos Kabupaten Temanggung, berupa uang pembinaan dan sarana penunjang peningkatan ekonomi. — rnm/mh

Syandria Kameron

Perempuan muda itu terlihat tak canggung menggunakan kebaya dan kain. Usianya memang belum seperempat abad. Namun, sapaan "Bu Kepsek" sering disematkan kepadanya. Syandria tak benar-benar memimpin sekolah formal, ia adalah nahkoda dari Kembalikan Baliku, komunitas pecinta seni dan budaya yang digagasnya pada 2019 lalu.

Kepada Parlementaria, Syandria mengakui bahwa ia baru mulai menari di usia belasan. Meski begitu, seni tari dan pertunjukan bukanlah sesuatu yang asing baginya. Syandria tumbuh dengan karya-karya Kinarya GSP yang dipimpin oleh Guruh Soekarnoputra yang tak lain adalah adik kandung sang kakek.

"Aku menari itu dari SMA ya, tapi bukan nari full

tradisional klasik itu loh. Awalnya, aku menari karena ada acara keluarga, lalu di situ aku diminta menari tari kreasi Jawa Barat namanya tarian Manuk Dadali yang diciptain sama Eyang Guruh. Nah, dari situ, aku sering latihan. Jadi, aku mulai suka nari gitu," cerita Syandria.

Langkah Syandria untuk menari ternyata tak berhenti di acara internal keluarga. Bersama Kinarya GSP, Syandria kemudian ikut tampil menarikan Tari Gending Sriwijaya di hadapan Raja Kamboja Norodom Sihamoni di Phnom Penh 2019 lalu pada perayaan persahabatan

Yang Muda Yang Mengangkat Budaya Bangsa

Di saat banyak anak muda hanyut dalam gegap-gempita budaya asing, Syandria justru asyik menyelami budaya bangsa. Tak lupa ia mengangkatnya dalam kemasan yang bisa diterima generasi kekinian.



Indonesia-Kamboja. Dari sana, keinginan untuk mendalami tari tradisional semakin mengge

"Dari situ aku sudah lumayan giat menari dan latihannya. Aku pikir sayang aja, nih, kalau setelah belajar nari enggak aku terusin lagi. Aku mulai ngobrol-ngobrol sama Eyang Guruh 'aku pegen seriusin nari. Terus Eyang Guruh bilang, 'iya belajar aja nari Legong, tari Bali,'" ujarnya sambil menirukan percakapan saat itu. Berbekal saran dari sang eyang, Syandria pun serius mencari guru tari untuk membimbingnya.

Melalui Wulan Desiari yang kemudian menjadi rekannya dalam mengembangkan KBK, akhirnya Syandria bertemu dengan Nyoman Trianawati yang merupakan murid dari maestro Ayu Bulantrisna Djelantik. Menurut



Penampilan Kembalikan Baliku di Synchronize Fest pada bulan Oktober 2022.

gadis dengan nama lengkap Rakyana Ratri Syandriasari Mardikawati Guntur Soekarno Putri Kameron, kecintaannya pada jenis Tari Legong muncul begitu saja dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Awal Lahirnya KBK

Kecintaannya kepada seni tari dan budaya Indonesia akhirnya melahirkan Kembalikan Baliku. Namanya terinspirasi dari salah satu lagu ciptaan Guruh Sukarno Putra. Disamping itu, Syandria juga memiliki pesan ingin mengembalikan kejayaan seni dan budaya Bali terutama yang ditujukannya bagi anak-anak

muda. "Sebenarnya ini (rencana) sudah lama, tapi karena pandemi jadi tertunda. Kita mulai buka kelas itu Maret 2021," katanya. Sebelum membuka kelas tatap muka di bilangan Jakarta, KBK terlebih dahulu menggelar kelas daring. Tujuannya saat itu membantu para seniman tari di Bali yang kegiatannya terhenti karena pandemi Covid-19.

Membawa Tari Tradisional Di Panggung Synchronize dan DWP

Sebagai anak muda yang aktif dan luwes dalam bergaul, Syandria tentu memiliki jejaring yang luas. Di tahun 2022, Syandria berhasil membawa tari-tari yang berakar dari tari tradisional dan klasik untuk tampil di antara gemerlap sorot lampu festival musik besar tanah air.



Menggebrak Garuda Stage dalam Gelaran DWP 2022, festival EDM terbesar tanah air pada bulan Desember 2022. Foto: Ist/uc

Puluhan penari dari KBK tampil apik menarikan tarian Cak Sesahyangan Dedari di gelaran Synchronize Festival pada Oktober 2022 lalu.

"Awalnya aku diundang di Synchronize radio ngobrol-ngobrol tentang Kembalikan Baliku. Kebetulan ada teman-teman dari Synchronize (festival), akhirnya aku memberikan ide 'boleh enggak, sih, kita KBK main di Synchronize'. Kita brainstorm beberapa tarian yang mau dibawakan akhirnya boleh. Kita seneng banget karena orang-orang jadi lebih mengetahui Kembalikan Baliku dan kedua tariannya kan kecak wanita, yang jarang banget dibawain," ungkapnya.

Diceritakan Syandria bahwa tari yang ditampilkannya ini mengambil inspirasi dari tarian kecak wanita yang tercipta pada saat kepemimpinan Presiden Sukarno. Ia kemudian meramunya kembali dan menyajikan dengan gaya yang lebih kontemporer ala KBK. Tarian yang berbeda juga disajikan di tengah gelaran musik EDM terbesar di Indonesia. Janger Semara Ratih tampil apik di atas Garuda Stage, membuka hari ke dua Djakarta Warehouse Project.

Tentang Privilese Dan Bayang-bayang Nama Besar

Gadis kelahiran tahun 1999 ini tak memungkir jika ia lahir dan tumbuh dengan privilese. Nama besar Presiden pertama Indonesia



Sebagai guwak/gowak, Burung Gagak mistis dalam Tari Legong Lasem.

yang juga proklamator kemerdekaan tersemat dalam nama lengkapnya. Syandria adalah cucu dari Mohammad Guntur Soekarnoputra, anak sulung Soekarno dan Fatmawati

Di bidang seni, Syandria dekat dengan Guruh Soekarnoputra, bahkan diceritakan bahwa beliau juga turun langsung mengajarkannya menari. Nama Guruh Soekarnoputra dengan Kinarya GSP dan Swara Mahardika erat kaitannya dengan pertunjukan yang grande. uc/mh

Setjen DPR RI Lepas 185 Mahasiswa Program ‘Magang Di Rumah Rakyat’

Untuk membangun digitalisasi dan modernisasi DPR RI, dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mewujudkan semua itu selalu terjaga, hingga akhirnya meraih penghargaan.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melepas 185 mahasiswa dalam acara penutupan Program ‘Magang di Rumah Rakyat’. Sebelumnya, mahasiswa ini telah mengikuti Program ‘Magang di Rumah Rakyat’ selama kurang lebih empat bulan dari 22 Agustus 2022



FOTO: ARIEF/NR

hingga 23 Desember 2022 di Gedung DPR RI.

Selama melakukan kegiatan magang, para mahasiswa didampingi para mentor yang berasal dari berbagai unit di lingkungan Setjen DPR RI. Pendampingan tersebut untuk memahami tiga fungsi DPR, legislasi, pengawasan, dan anggaran, serta diplomasi parlemen. Para mahasiswa juga dikenalkan dengan tugas dan fungsi Setjen DPR RI

sebagai penyokong kegiatan di kompleks parlemen.

Para mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia itu mengisi beberapa posisi di lingkungan parlemen, antara lain Analis Kebijakan Luar Negeri (10); Analis Media (5); Asisten Analis APBN (20); Asisten Analis Pemantauan UU (9); Asisten Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (4); Asisten Pengembang Teknologi Pembelajaran (20); Asisten Perancangan Undang-Undang (9); Back End Programmer (8); Desain Grafis Dinamis TV (3); Mobile Programmer (7); Parliament Trainee (78); Pengumpul dan Pengolah Data (10); dan Website Designer (2).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan, program ‘Magang di Rumah Rakyat’ DPR RI merupakan salah satu bentuk dukungan DPR RI dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. “Program Magang Di Rumah Rakyat DPR RI merupakan perwujudan parlemen modern, di mana ada tiga indikator parlemen modern, yaitu



FOTO: ARIEF/NR

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dalam foto bersama usai menutup Program ‘Magang di Rumah Rakyat’, di Ruang KK II, Gedung Nusantara, Jumat (23/12/2022).

transparansi, penggunaan teknologi informasi, dan representasi perjuangan aspirasi masyarakat. Salah satu aspirasi yang harus diperjuangkan adalah pendidikan dan pengembangan SDM Indonesia," katanya.

Pasalnya, untuk memasuki dunia kerja tidak cukup hanya belajar dari kelas, laboratorium, perpustakaan, atau scrolling media sosial, tetapi harus menceburkan diri langsung ke dalam dunia kerja. Pengalaman dan pengetahuan bekerja di industri, lembaga-lembaga internasional, kementerian, lembaga yudikatif, maupun lembaga legislatif adalah kesempatan untuk mengikuti passion dalam menyiapkan diri memasuki dunia kerja dengan beragam profesi.

Untuk itu, ia mengimbau mahasiswa tekun dalam mengutamakan inovasi, kolaborasi, dan integrasi. Inovasi tidak harus berbentuk sebuah penemuan yang menakjubkan, namun bisa berbentuk praktik yang dilakukan setiap hari dan terbukti berhasil mengubah keadaan.

Plt. Kepala Pusdiklat DPR RI Hernadi dalam laporannya mengatakan, peserta Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI Tahun 2022 telah mengikuti berbagai macam agenda dan telah menempuh pembelajaran magang selama 900 jam pelatihan atau setara dengan satu semester. Ia juga menjelaskan bahwa setidaknya ada lima agenda yang telah dilalui dalam rangkaian ini, seperti observasi, kuliah umum, audiensi dengan pimpinan dan anggota dewan, magang di unit kerja, simulasi melalui role play untuk tiga fungsi DPR, serta evaluasi.

"Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pengalaman bagi para mahasiswa untuk turut merasakan atmosfer kerja DPR RI dan Setjen DPR RI. Di sini, mahasiswa tidak hanya melihat ruang-ruang rapat DPR, tetapi para mahasiswa juga telah mendapatkan kesempatan untuk menghadiri sidang paripurna," ujarnya.

gal/mh

Menyambut Tahun Baru Dengan Prestasi

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengawali tahun baru 2023 dengan mengukir sejumlah catatan prestasi. Prestasi dan penghargaan ini diperoleh dari sejumlah lembaga nasional dan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi Setjen DPR RI berkembang menjadi lebih baik lagi di tahun 2023 ini.

Anugerah Meritokrasi Berkategori Sangat Baik dari KASN

Setjen DPR RI dianugerahi Meritokrasi hasil penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan kategori Sangat Baik. Penghargaan ini diterima Kepala Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko Di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Desember lalu. Keberhasilan ini diperoleh atas meningkatnya kualitas Setjen DPR RI, yang pada 2021 mendapat kategori Baik di poin 292, kini meningkat jadi Sangat Baik di poin 345,5.

Menurut Asep, kunci sukses penghargaan Meritokrasi tersebut

adalah dengan komitmen dan kekompakan seluruh stakeholder yang ada di Setjen DPR RI. "Kita punya komitmen, kita harus melakukan perbaikan. Jadi, komitmen kita untuk mencapai target bahwa kita harus lebih baik. Kemudian caranya ketika ada aturan (yang kurang tepat) harus segera kita ubah atau ada aturan yang belum kita buat, kita buat. Kemudian kita komitmen untuk melaksanakannya," jelas Asep saat ditemui Parlementaria.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen DPR RI memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, kepada Inosentius Samsul Kepala Badan Keahlian DPR RI yang mewakili Sekretariat Jenderal DPR RI di Tangerang, Banten, Desember lalu.

gal/mh



Kepala Pusat Teknologi Informasi Djaka Dwi Winarko mewakili Sekretaris Jenderal DPR RI saat menerima penghargaan secara simbolis oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas.



Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul mewakili Sekretariat Jenderal DPR RI saat menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Republik Indonesia di Tangerang, Banten, Kamis (14/12/2022).



Oleh:
Hanibal Hamidi
Mantan Dokter Teladan

Haruslah menjadi kesadaran bersama bahwa suatu pandemi tidak pernah hilang sama sekali, dan kita akan hidup bersama penyebab penyakit tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengendalikan, termasuk pandemi Covid 19 saat ini. Pandemi Covid-19 yang sangat cepat penularannya dibandingkan pandemi lainnya merupakan akibat kemajuan infrastruktur dan teknologi transportasi, disertai peningkatan kesejahteraan negara-negara di dunia.

Walau tingkat kematiannya rendah, tetapi akibat kecepatan penularannya yang sangat tinggi, akan menimbulkan jumlah kematian yang besar dalam waktu yang singkat, bila diakumulasikan pada satu negara. Hal inilah yang menimbulkan kepanikan masyarakat dunia dan mengakibatkan terhentinya berbagai interaksi manusia dalam suatu wilayah, negara, dan antarnegara dalam waktu 2 tahun. Inilah yang menimbulkan kerugian sosial yang

Mengakhiri Pandemi Covid-19

Dari catatan seluruh pandemi yang telah terjadi di masa lalu, banyak mengajarkan kepada kita bahwa permasalahan yang diakibatkan pandemi adalah dampak kepanikan yang tinggi dan menimbulkan berbagai sikap sosial masyarakat di suatu negara untuk menyelamatkan diri dari pandemi.



sangat besar pada dimensi kehidupan manusia di seluruh dunia.

Berdasarkan pengetahuan dari berbagai wabah pandemi

terdahulu, pada umumnya suatu pandemi memiliki kesamaan proses pengakhiran. Proses berakhirnya pandemi, dimulai saat telah

ditemukan vaksin. Vaksinasi yang tepat akan meningkatkan imunitas seseorang terhadap serangan penyakit pandemi tersebut. Vaksinasi massal secara serentak, disertai pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin bagi setiap orang, akan semakin sedikit peluang untuk terjadinya penularan baru.

Dengan demikian peluang hidup virus, bakteri, atau mikroba penyebab pandemi akan semakin sedikit. Sepanjang hal itu semua dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan, maka akan berakhirlah pandemi. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, mantan menteri kesehatan Ethiopia, mengatakan, kita harus menghadapi ancaman kesehatan global, yaitu pandemi Covid-19 yang dimulai pada akhir 2019 di Wuhan, China.

Pandemi Covid-19 yang disebabkan virus corona, atas penelitian WHO di Wuhan, China, pada 30 Januari 2020, menyatakan bahwa virus corona sebagai Darurat Kesehatan Global (PHEIC), secara resmi menamakan penyakit itu Covid-19 pada 11/3/2020. Pada konferensi pers 22 April 2020 lalu, Michael Ryan, Direktur Program Kedaruratan Kesehatan WHO,

Walau tingkat kematiannya rendah, tetapi akibat kecepatan penularannya yang sangat tinggi, akan menimbulkan jumlah kematian yang besar dalam waktu yang singkat, bila diakumulasikan pada satu negara.

menyimpulkan misi menyeluruh organisasi tersebut; "Mandat yang kami miliki, untuk menetapkan standar global dan untuk memberikan saran yang kuat kepada negara-negara mengenai langkah-langkah kesehatan masyarakat yang rasional," terang Ryan.

Menurut Direktur Jenderal WHO, pandemi Covid-19 telah menewaskan jutaan orang dan menginfeksi 606 juta sejak muncul pada akhir 2019. Pandemi ini diambang berakhir. Untuk itu, direkomendasikan pelaksanaan enam kebijakan singkat untuk mengakhiri pandemi

dunia, sebagai berikut:

1. Bagi seluruh pihak terkait pembangunan kesehatan, menyusun rencana pengakhiran pandemi berdasarkan grafik tren penurunan penambahan kasus baru per hari di suatu wilayah. Ditujukan untuk melokalisir sekaligus pemusnahan virus penyebab Covid-19 di wilayah secara bersamaan. Hal ini dilakukan melalui pengobatan penderita dan peningkatan jangkauan vaksinasi booster, yang disertai protokol kesehatan. Tindakan

“

Berdasarkan pengetahuan dari berbagai wabah pandemi terdahulu, pada umumnya suatu pandemi memiliki kesamaan proses pengakhiran. Proses berakhirnya pandemi, dimulai saat telah ditemukan vaksin. Vaksinasi yang tepat akan meningkatkan imunitas seseorang terhadap serangan penyakit pandemi tersebut. Vaksinasi massal secara serentak, disertai pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin bagi setiap orang, akan semakin sedikit peluang untuk terjadinya penularan baru.

Covid-19 di setiap negara, antara lain; vaksinasi, testing dan sequencing, sistem kesehatan yang tepat untuk pelayanan Covid-19, mempersiapkan penanganan bagi lonjakan kasus, serta melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian, serta menyampaikan informasi Covid-19 kepada masyarakat.

Berdasarkan berbagai informasi tersebut di atas, beberapa hal strategis yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mengakhiri pandemi

tersebut disertai pemeriksaan yang massif berdasarkan pergerakan setiap kasus baru yang ditemukan.

2. Bersama seluruh masyarakat, membudayakan protokol kesehatan yang berkelanjutan, disertai sistem surveylance yang solid.
3. Melakukan upaya percepatan kemandirian kesehatan bagi pemenuhan hak dasar pelayanan kesehatan Indonesia. 🐼



Masjid Agung Palembang.

FOTO: IST/AHA

Sehari di Kota Wong Kito Galo

Palembang adalah bukti bahwa kosmopolitanisme itu nyata di Nusantara. Bumi Sriwijaya ini menyuguhkan perpaduan budaya dari Palembang, Jawa, Tiongkok, Arab, hingga Eropa yang terlihat dari makanan, bangunan, dan lanskap kotanya.

Untuk memulai perjalanan singkat selama sehari di kota ini, bolehlah mengawali sarapan Mi Celor di Pasar Ilir. Banyak yang menilai mi ini ialah perpaduan budaya China dan Palembang. Mi Celor merupakan mi yang diseduh atau 'dixelor' dengan menggunakan air panas dan disajikan dengan kuah santan plus kaldu udang. Mi ini juga disajikan dengan irisan udang rebus, telur rebus, bawang goreng gurih, daun kucai, sekaligus rebusan kecambah.

Setelah mengisi perut, kita dapat berjalan kaki kurang dari 15 menit menyusuri kali kecil di samping Kantor Wali Kota Palembang yang bermuara ke Sungai Musi. Sungai besar ini di pagi hari menyuguhkan pemandangan Jembatan Ampera, monumen kebanggaan wong kito gallo, dan keriuhan di bawahnya yang dilalui berbagai kapal.

Kuto Besak

Sungai Musi jadi saksi kejayaan Palembang yang menjadi bandar perdagangan sejak era Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang, sampai akhirnya takluk di tangan kolonial Belanda. Tak



Sungai Musi.

FOTO: AGUNG



Rumah Residen/Museum Sultan Mahmud Badaruddin II.



Jembatan Ampera dari Sungai Musi.



Suasana di dalam museum.

heran di pinggir sungai besar ini berdiri Benteng Kuto Besak. Benteng ini sekarang alih fungsi menjadi Kantor Komando Daerah Militer Sriwijaya, namun keasrian gedung masih terlihat dengan dinding tebal benteng yang tetap berdiri kokoh.

Sebenarnya benteng ini berfungsi sebagai keraton Kesultanan Palembang, dimana pembangunan diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I yang memerintah pada tahun 1724-1758. Karena berada di tempat terbuka, maka keraton dibekali tembok besar, tinggi, serta dilengkapi empat sudut (bastion) untuk mengintai dan menembak. Namun, fungsinya sebagai tempat tinggal raja tetap ada dimana keraton memiliki pelataran yang luas, balai agung, dan gerbang besar.



Benteng Kuto Besak.

Ex-Rumah Residen

Melipir di samping benteng, kita dapat mengunjungi Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Dengan tiket seharga Rp5.000, pengunjung dapat memasuki museum dan menikmati arsitektur bergaya kolonial tersebut. Sejatinya, museum itu merupakan bekas rumah residen kolonial Sumatra Selatan abad ke-19. Adapun rumah residen itu dibangun di atas puing-puing istana lama Sultan Mahmud Badaruddin I, usai dibombardir pemerintah kolonial pada 1823. Bangunan batu dua lantai ini dibangun dengan gaya yang memadukan gaya Eropa dengan arsitektur tropis Hindia, berfokus pada gaya rumah bari tradisional yang ditemukan di Palembang.

Masjid Agung Palembang

Usai dari museum, berjalan sedikit ke arah utara, kita melihat kembali warisan sejarah Palembang yakni Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin, I Jayo Wikramo. Masjid ini dipengaruhi oleh 3 arsitektur yakni Melayu, China, dan Eropa. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama berundak tiga dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar candi Hindu-Jawa.

Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada rupa jendela masjid yang besar dan tinggi. Adapun material bangunan seperti marmer dan kaca diimpor langsung dari Eropa. Sedangkan arsitektur China dilihat



Mie Celor.



Pindang Patin di Sekanak.

dari masjid utama yang atapnya berbentuk limas, terdiri dari tiga tingkat. Rupa ini merupakan bentuk atap kelenteng.

Pindang Di Sekanak

Setelah seharian berkeliling, makan siang dengan menu pindang dapat jadi pilihan. Kita dapat berkunjung ke area sekanak, tidak jauh dari kawasan Kuto Besak. Salah satu tempat pindang terkenal ialah RM Musi Pindang Sekanak. Jangan bayangkan kalau di tempat ini seperti restoran mewah. RM pindang ini hanya menempati bangunan semi permanen ber dinding kayu. Namun soal rasa, tidak usah ragu. Penulis memilih ikan patin, sebab baung dan gabusnya saat itu tengah kosong. Perpaduan serai, kunyit, lengkuas, cabai, dan asam kandis menerbitkan air liur untuk menyantap pindang dengan lahap.

Makan pindang menjadi penutup perjalanan satu hari di kota ini. Berbagai tempat telah disinggahi, dan masih banyak bagian Kota Palembang yang wajib disusuri di kemudian hari. aha/mh

Ngetrail Keliling Indonesia



Bambang Hermanto bersama teman komunitasnya saat ngetrail ke berbagai daerah di Indonesia.

FOTO: IST/NR

Terpengaruh kawan-kawan terdekatnya, mengendarai motor trail jadi hobi yang membawa kepuasan tersendiri. Menjelajah negeri dengan motor trail punya dimensi lain. Jalan terjal berlumpur jadi habitat pengendara trail. Inilah hobi Bambang Hermanto, sang pengendara trail.

Pria asal Indramayu, Jawa Barat ini, bercerita tentang nostalgia ketika awal menggemari trail. Banyak kawan terdekatnya terutama dari Subang, Jabar yang hobi trabas alias ngetrail. Menyaksikan kawan-kawannya ngetrail, memantik hasrat Bambang untuk ikut trabas. "Awalnya saya menyukai motor trail karena teman-teman saya hobi trabas. Saya pun 'ngoprek-ngoprek' motor sampe akhirnya suka trabas, ikut ikutan mereka. Dan akhirnya saya pun beli motor trail," kisahnya.

Kali pertama punya trail, Bambang membeli model KLX dari Kawasaki. Setelah itu ia berganti-ganti model trail, seperti KTM 250 cc, KTM 350 cc, sampai yang 450 cc. Menurutnya, mengendarai jenis KTM sangat enak dan mengasyikkan dibanding jenis trail lain. "KTM lebih enak dipakainya,

karena memang spesialis untuk trail. Motornya enteng dan torsinya besar. Beda aja dipakai di jalan berlumpur," ungkapnya.



FOTO: IST/NR

Motor trail cocok digunakan untuk jalan terjal, berlumpur, dan naik turun gunung. Tapi, untuk jalan rata dan mulus, menurutnya, terasa kurang enak. Bambang pun akhirnya ikut komunitas trail. Ketika itu, ia ikut komunitas di Subang, karena di Indramayu belum ada yang memiliki trail. Dan salah satu kawan komunitas trailnya adalah Ojang Suhandi, mantan Bupati Subang. Hampir setiap minggu, politis Partai Golkar ini, ikut ngetrail bersama komunitasnya ke berbagai daerah.

Bandung, Pangandaran, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Yogyakarta, Kulonprogo, Semarang, Bromo, Bali, dan Lampung sudah jelajahi. Hampir semua kota di Jawa, Sumatera, bahkan Kalimantan telah disambangi Bambang dengan trailnya. Ngetrail keliling Indonesia sangat asyik. Lalu, ia bercerita saat ikut *adventure* trail ke Garut. Dari Cipanas menuju Rancabuaya luar biasa medannya. Berangkat pukul 8:00 pagi dan sampai Rancabuaya pukul 1:00 malam.

"Saya terdampar sendirian di hutan Sancang. Saya enggak tahu hutan Sancang itu angker dan mengerikan. Saat yang sama hujan besar turun. Saya berhenti sejenak di rumah penduduk, sambil menunggu teman-teman yang masih jauh di belakang saya. Seorang bapak tua memberi tahu saya, 'kalau keluar jangan sendirian.' Saya tanya, kenapa enggak boleh sendiri? Bapak itu jawab, 'Dulu saya masuk ke sini sore, tapi baru sampai rumah esoknya. Muter-muter di dalam hutan.' Di situ saya berpikir, wah, hutan ini angker," ceritanya, mengenang masa ngetrail dulu.

Tak lama kemudian, teman-temannya berdatangan setelah menunggu sekitar satu jam. Setelah itu, melanjutkan penjelajahannya kembali keluar dari Hutan Sancang. Tiba di sebuah pos, ia pun ngopi, melepas lelah dan ketegangan. Ternyata di hutan itu masih banyak macam liar hidup. Begitulah suka dukanya ngetrail menjelajah negeri.

mh



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menerima kunjungan Duta Besar Belanda untuk Republik Indonesia Mr. Lambertus Christian Grijns di Fadli Zon Library.



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menerima kunjungan Duta Besar Belanda untuk Republik Indonesia Mr. Lambertus Christian Grijns di Fadli Zon Library.

Gado-gado Pelumas Diplomasi

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Belanda untuk Republik Indonesia Mr. Lambertus Christian Grijns.

Dalam kunjungan ini, Fadli menyambut dengan mengajaknya melihat-lihat dan mendiskusikan berbagai macam koleksi buku, karya seni, dan berbagai macam benda bersejarah yang ada di Fadli Zon Library.

Poin penting dalam diskusi tersebut, Pemerintah Belanda sudah sangat terbuka akan mengembalikan benda-benda purbakala dan cagar budaya yang pada masa kolonial dibawa ke negaranya. Dalam kunjungan ini, obrolan kedua belah pihak berjalan sangat akrab. Fadli menyediakan makan siang kesukaan Dubes Belanda. Lambertus yang sedang menjalani pola makan vegetarian, disuguhkan gado-gado. Dia pun merasa senang dengan jamuan yang disediakan Fadli.

Obrolan semakin hangat dan akrab dibarengi dengan makan siang bersama. Menyambut niat baik pengembalian benda-benda purbakala tersebut, Fadli menyarankan kepada pemerintah agar mempersiapkan berbagai macam yang diperlukan untuk merawat dan menjadikan sarana pendidikan bagi masyarakat.

"Selain studinya, kita juga harus mempersiapkan di mana tempatnya, kemudian bagaimana cara memamerkannya. Kita harus mempersiapkan diri, tetapi satu kemajuan besar dari pihak Belanda, mengatakan bahwa mereka sangat terbuka untuk mengembalikan aset-aset nasional kita," papar Fadli di daerah Bendungan Hilir, Jakarta, Selasa (17/1/2023), lalu.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga berpesan kepada pemerintah, agar mempersiapkan studi mendalam guna menerima benda-benda yang akan dikembalikan. Tak kalah penting, ahli-ahli di bidangnya juga harus dilibatkan. Menurutnya, mempersiapkan orang yang ahli dalam bidangnya merupakan upaya menjaga dan melestarikan benda peninggalan nenek moyang. **— ssb/mh**



FOTO: MUNICHEN/NR



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
mengucapkan
SELAMAT TAHUN BARU IMLEK

2023



@dpr_ri



DPRRI



@DPRRI



DPRRI



@dpr_ri